

**EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR
JENDERAL HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA
TAHUN 1808-1811**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

JOPI ENGEL GURNANDY

NIM : 091314028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2015

**EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR
JENDERAL HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA
TAHUN 1808-1811**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

JOPI ENGEL GURNANDY

NIM : 091314028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

2015

MAKALAH

**EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR
JENDERAL HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA
TAHUN 1808-1811**



Oleh :

JOPI ENGEL GURNANDY

NIM : 091314028

Telah disetujui oleh :

Pembimbing

Dr. Anton Haryono, M.Hum

Tanggal, 23 Juli 2014

MAKALAH
EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR
JENDERAL HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA
TAHUN 1808-1811

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

JOPI ENGEL GURNANDY

NIM : 091314028

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

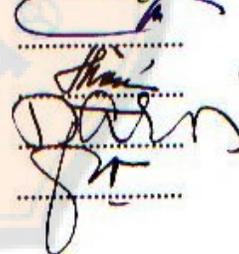
Pada tanggal, 26 Februari 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap
Ketua : Indra Darmawan, S.E., M.Si
Sekretaris : Dra. Th. Sumini, M.Pd
Anggota : Dr. Anton Haryono, M.Hum.
Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd

Tanda Tangan



Yogyakarta, 26 Februari 2015

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

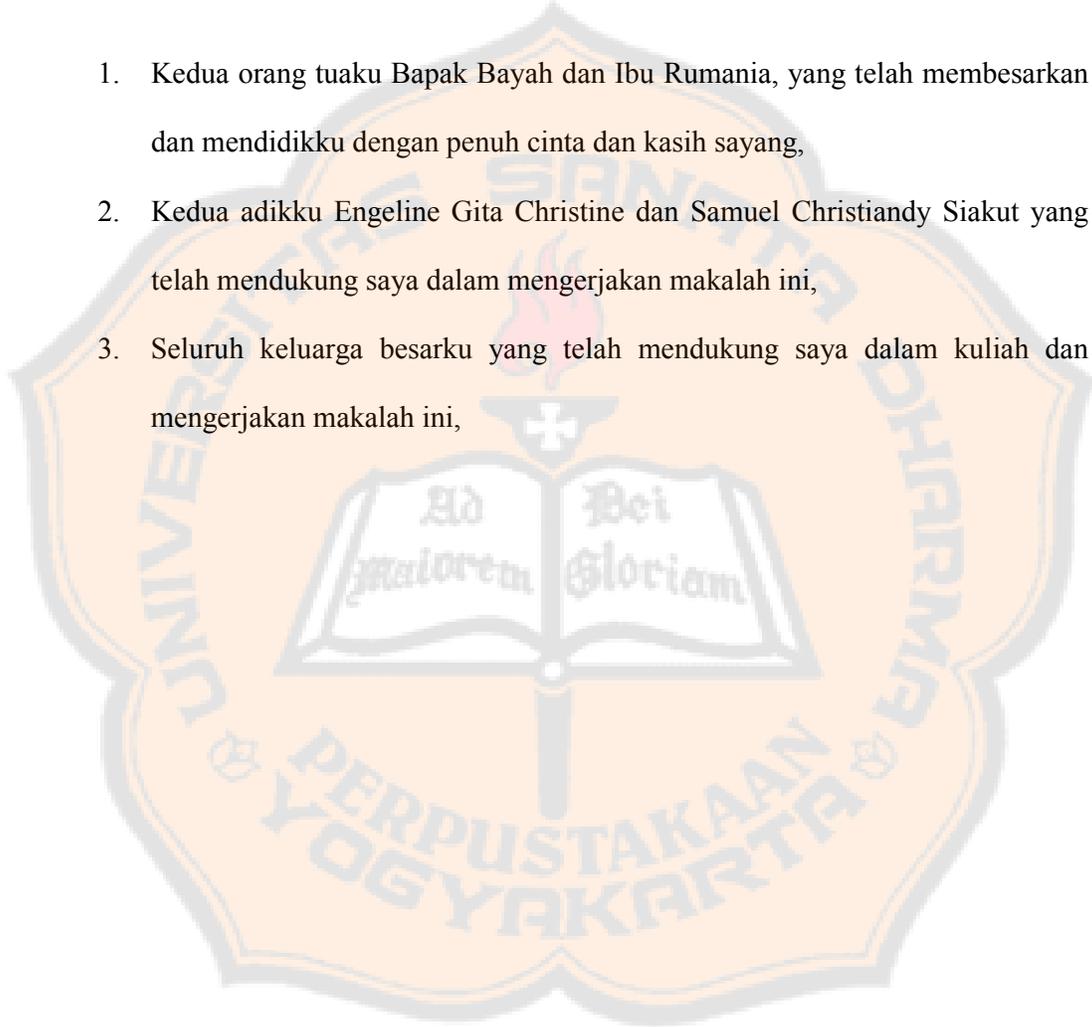


Robandi
Robandi, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Bayah dan Ibu Rumania, yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
2. Kedua adikku Engeline Gita Christine dan Samuel Christiandy Siakut yang telah mendukung saya dalam mengerjakan makalah ini,
3. Seluruh keluarga besarku yang telah mendukung saya dalam kuliah dan mengerjakan makalah ini,



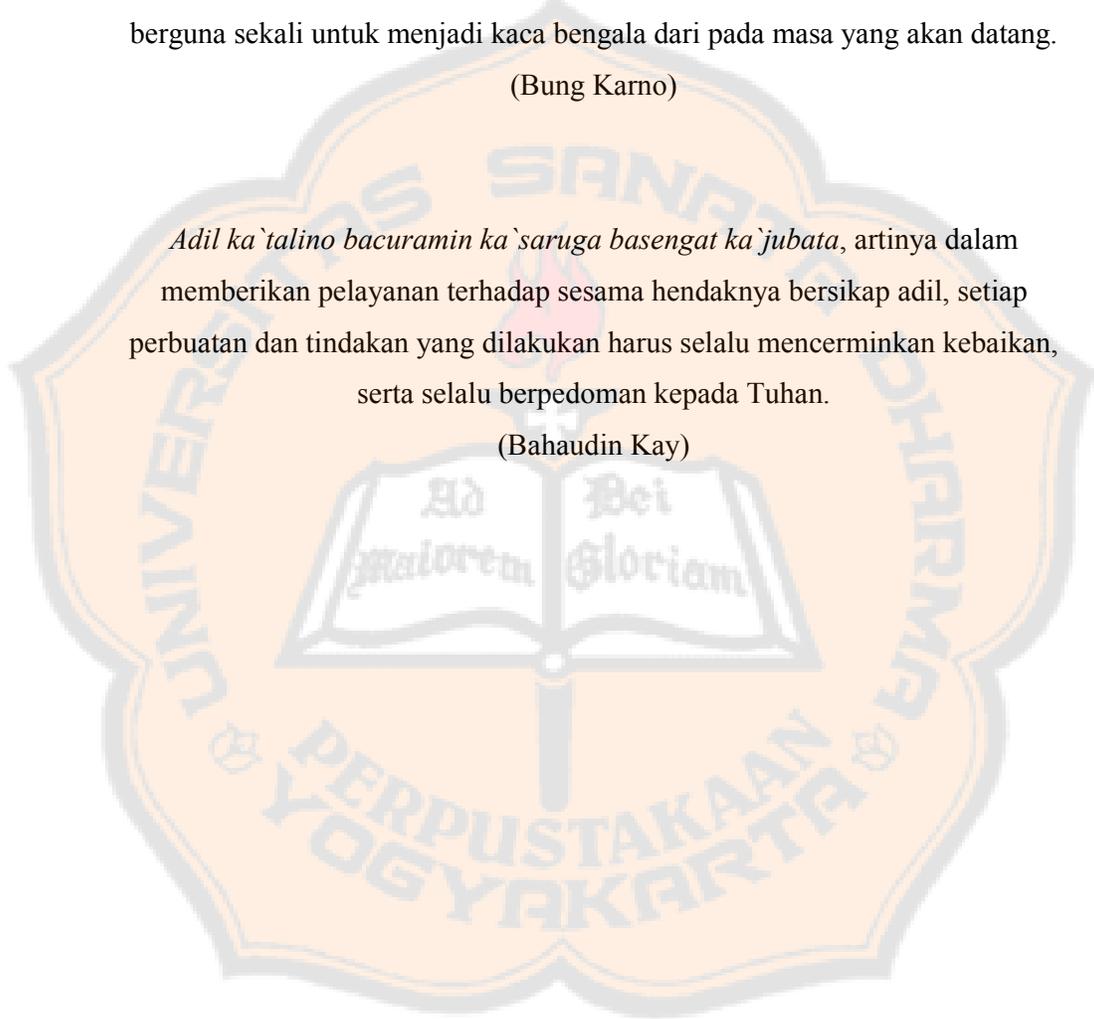
MOTTO

Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.

(Bung Karno)

Adil ka`talino bacuramin ka`saruga basengat ka`jubata, artinya dalam memberikan pelayanan terhadap sesama hendaknya bersikap adil, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus selalu mencerminkan kebaikan, serta selalu berpedoman kepada Tuhan.

(Bahaudin Kay)

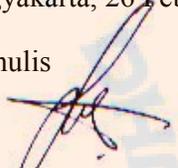


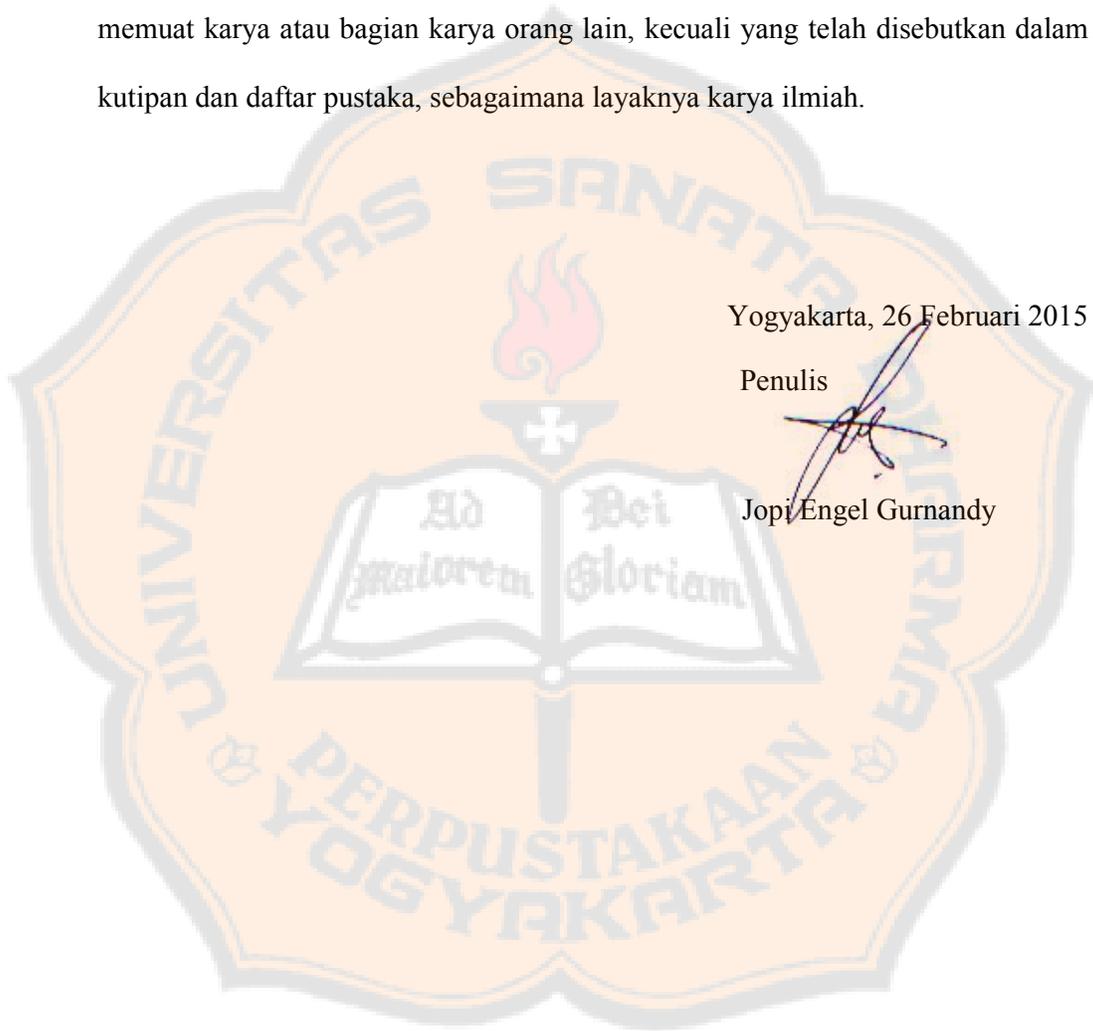
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

Penulis


Jopi Engel Gurnandy



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Jopi Engel Gurnandy

Nomor Mahasiswa : 091314028

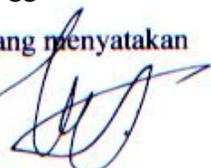
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Eksplorasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2015

Yang menyatakan

Jopi Engel Gurnandy



ABSTRAK
EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR JENDERAL
HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA TAHUN 1808-1811

Jopi Engel Gurnandy
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015

Penulisan makalah ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan latar belakang penugasan Gubernur Jenderal Daendels di Jawa tahun 1808-1811; 2) Mendiskripsikan proses eksploitasi sumber daya pada masa Daendels di Jawa tahun 1808-1811; 3) Menjelaskan dampak eksploitasi pada masa Daendels di Jawa tahun 1808-1811.

Makalah ini disusun melalui studi pustaka, menggunakan pendekatan multidimensional, dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penulisan makalah ini menunjukkan bahwa: 1) Penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811 dilatarbelakangi dengan adanya perubahan politik di negeri Belanda dan ancaman invasi Inggris atas wilayah Jawa. 2) Proses eksploitasi sumber daya dimulai dengan membenahi sistem administrasi pemerintahan kolonial di Jawa. 3) Berlangsungnya pemerintahan kolonial rezim Daendels membawa dampak negatif dan positif dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya bagi Indonesia dan Belanda. Kekuasaan negara-negara kerajaan tradisional di Indonesia (Jawa) semakin merosot, sedangkan intervensi kekuasaan kolonial Belanda tampak semakin meluas.

ABSTRACT
EKSPLORATION OF RESOURCES OF GOVERNOR GENERAL
HERMAN WILLEM DAENDELS PERIOD IN JAVA
IN THE YEAR 1808 TO 1811

Jopi Engel Gurnandy
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015

This paper intends, to: 1) Assignment explain the background of in Java in 1808-1811 the Governor General Daendels; 2) Describe the resource exploitation of Daendels in Java during the year 1808-1811; 3) Explain the impact of the exploitation during the years 1808-1811 in Java.

The paper used multidimensional approach, and is written descriptively.

The results of this paper show that: 1) The assignment of the Governor General Herman Willem Daendels in Java in 1808 to 1811 is based on a political change in the Netherlands and the threat of British invasion in Java. 2) The process begins with the exploitation of resources to fix the administrative system of the colonial rule in Java. 3) The colonial rule during Daendels regime hal negative and positive impacts in politics, economics and socio-culture for Indonesia and the Netherlands. Power states of the traditional kingdoms in Indonesia (Java) were declining, while the intervention of Dutch colonial rule seemed increasingly widespread.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “*Eksplorasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811*”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.
3. Dr. Anton Haryono, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan makalah ini.
4. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kedua orang tuaku Bapak Bayah, Ibu Rumania dan kedua adikku Engeline Gita Christine dan Samuel Christiandy Siakut, beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dorongan spiritual dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, terimakasih atas dukungan dan doanya.
6. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2009 yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan makalah ini,
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 26 Februari 2015



Jopi Engel Gurnandy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PENUGASAN GUBERNUR JENDERAL HERMAN	
WILLE DAENDELS DI JAWA.....	10
A. Kondisi Menjelang Penugasan Daendels	10
1. Runtuhnya VOC	10

2. Pemerintah Hindia-Belanda	13
B. Penugasan Daendels di Jawa	15
1. Latar belakang penugasan Daendels	15
2. Tujuan penugasan Daendels.....	20

BAB III PROSES EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA

GUBERNUR JENDERAL HERMAN WILLEM

DAENDELS DI JAWA.....	22
A. Konsep Eksploitasi.....	22
B. Reformasi Administrasi.....	27
1. Reformasi tata pemerintahan	27
2. Reformasi lembaga peradilan	39
C. Pembangunan Infrastruktur dan Politik Diktator.....	31
1. Membangun pertahanan militer	31
2. Mega proyek jalan Raya Pos.....	33
3. Tanam Paksa	36
4. Tindakan-tindakan penyelewengan Daendels.....	38

BAB IV DAMPAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA

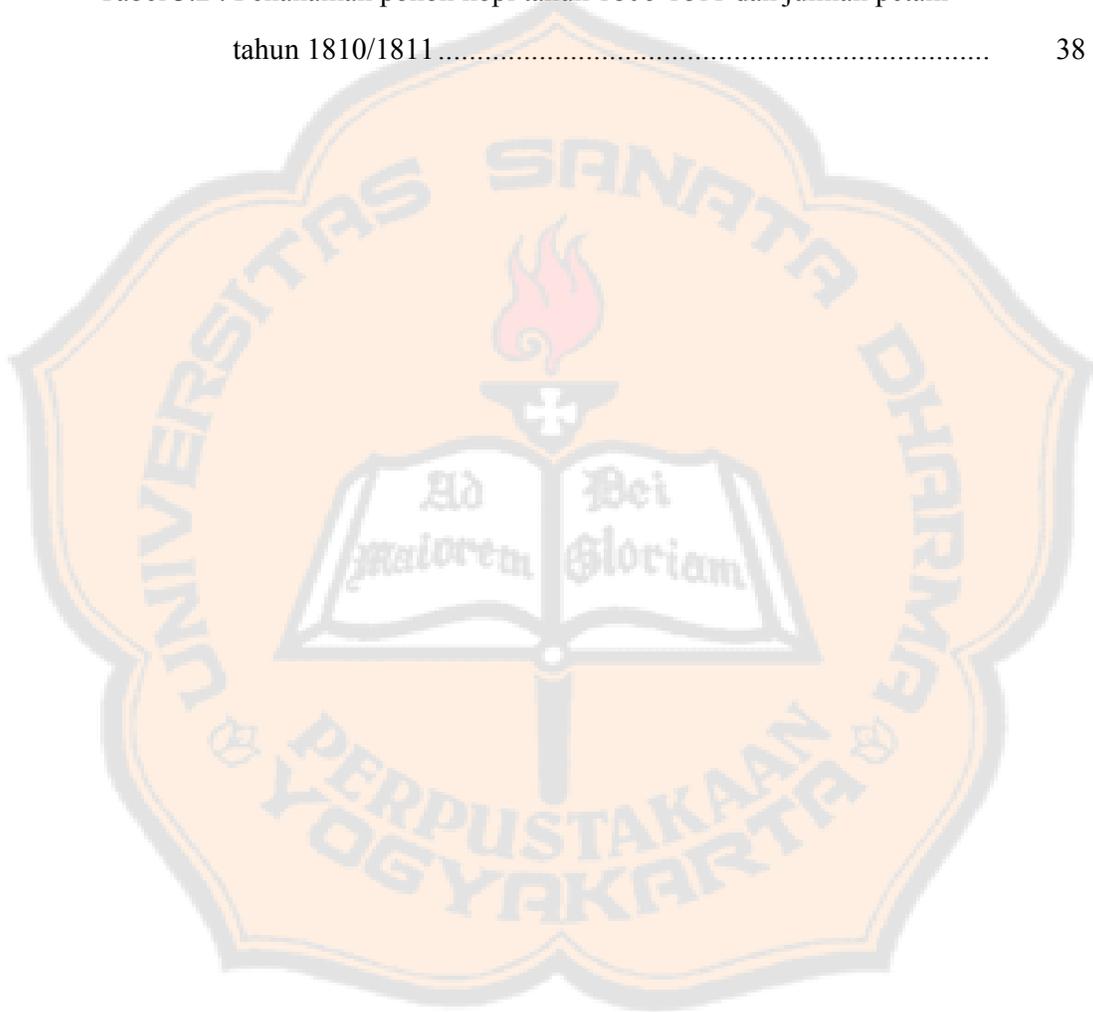
GUBERNUR JENDERAL HERMAN WILLEM

DAENDELS DI JAWA.....	41
A. Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya bagi Indonesia	41
1. Dampak negatif.....	41
a. Dalam bidang politik.....	41
b. Dalam bidang ekonomi	44
c. Dalam bidang sosial-budaya.....	45
2. Dampak positif.....	46
a. Dalam bidang politik.....	46
b. Dalam bidang ekonomi	48

c. Dalm bidang sosial-budaya	49
B. Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya bagi Belanda.....	51
1. Dampak negatif	51
a. Dalam bidang politik.....	51
b. Dalam bidang ekonomi	52
c. Dalam bidang sosial-budaya.....	54
2. Dampak positif	55
a. Dalam bidang politik.....	55
b. Dalam bidang ekonomi	57
c. Dalam bidang sosial-budaya.....	58
BAB V KESIMPULAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Produksi kopi dari daerah Batavia dan Pariangan (1796-1810) .	37
Tabel 3.2 : Penanaman pohon kopi tahun 1806-1811 dan jumlah petani tahun 1810/1811	38



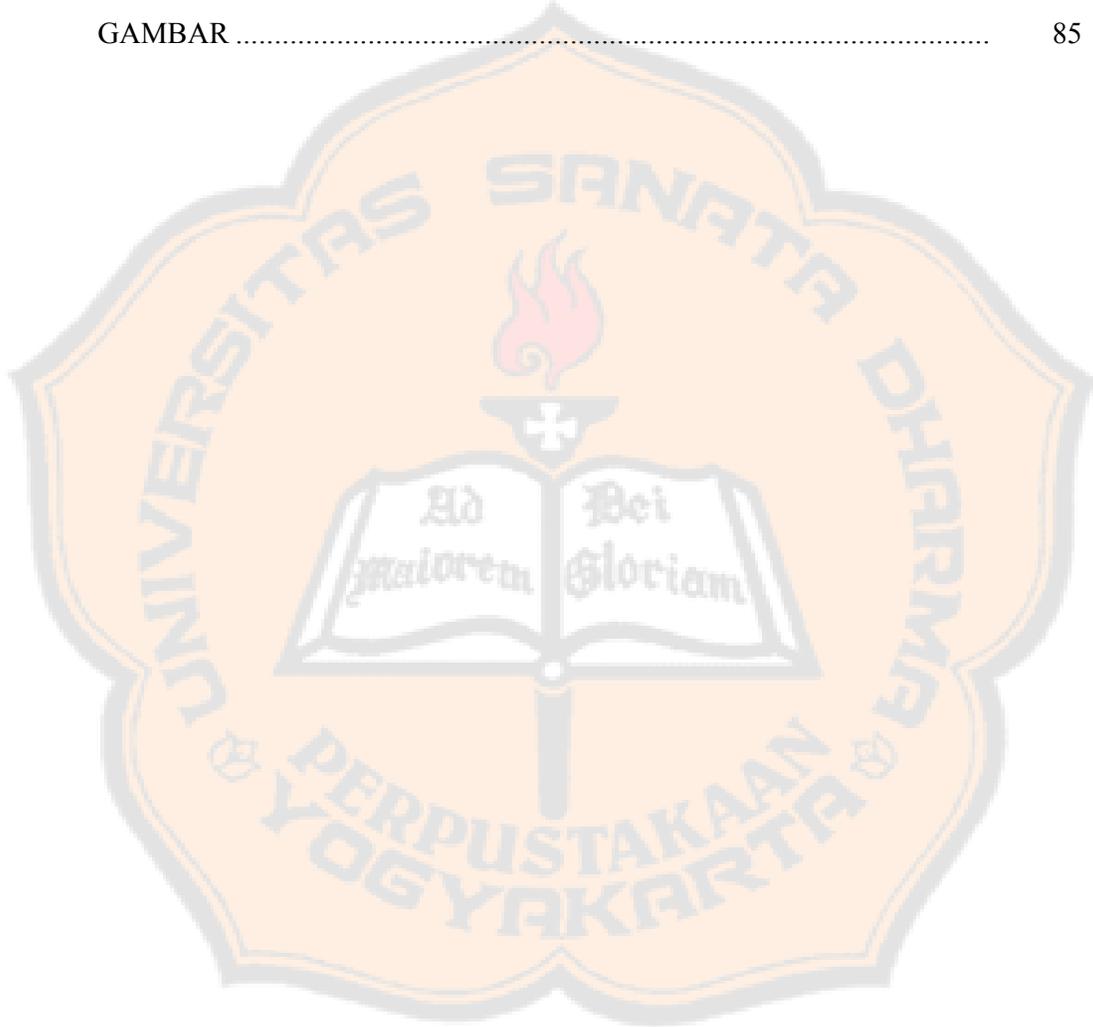
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Peta jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan)..... 34



DAFTAR LAMPIRAN

SILABUS.....	66
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....	69
GAMBAR	85



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang akhir abad ke-18, hampir bersamaan dengan keruntuhan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), negeri Belanda bersekutu dengan Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada masa itu, kondisi politik di Eropa ditandai dengan perluasan paham dan cita-cita liberal, sebagai akibat dari Revolusi Prancis. Pengaruh paham dan cita-cita liberal ini menggema hampir di seluruh wilayah Eropa, tak terkecuali di negeri Belanda. Kaum Patriot Belanda sekaligus pengagum paham dan cita-cita liberal, dengan bantuan kaisar Napoleon berhasil menggulingkan rezim Pangeran Willem V dan mendeklarasikan Republik Bataaf (1795). Sejak saat itu, sampai hampir tiga dekade pertama abad ke-19 geliat Revolusi Prancis dengan ide-ide liberal menandai gerak sejarah Indonesia.¹ Mengenai pengaruh revolusi Prancis disebutkan demikian:

Perkembangan politik di negara Belanda tampaknya dipengaruhi oleh revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Kongkretnya, dengan bantuan tentara Prancis kaum “patriot” di Negeri Belanda telah menumbangkan kerajaan Belanda dan menggantikannya dengan suatu bentuk negara baru, yaitu yang dinamakan Bataafse Republik. Pemerintah baru inilah yang membubarkan VOC dan menerima penyerahan segala kekayaan, kawasan-kawasan yang sudah dijajah, dan seluruh utang-utangnya. Namun, tidak lama kemudian, perkembangan politik di Indonesia mengalami lagi perubahan dengan tampilnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar di Prancis pada tahun 1804....Kaisar Napoleon pada tahun 1806 membubarkan de Bataafse Republik dan mengangkat adiknya yaitu Louis

¹Anton Haryono, *Sejarah (Sosial) Ekonomi Teori Metodologi Penelitian dan Narasi Kehidupan*, Yogyakarta, USD, 2011, hlm. 107.

Napoleon sebagai Raja Belanda.....Louis Napoleon mengirim tokoh gerakan patriot yang bernama Herman Willem Daendels sebagai wakilnya di Indonesia dengan pangkat Gubernur Jenderal (1808-1811).²

Larinya penguasa negeri Belanda (Willem V) ke Kew (Inggris) dan pembentukan Republik Bataaf tahun 1795 karena diusir oleh kaum Patriot yang berjaya, mengubah keadaan,³ dan berdampak pula terhadap VOC. Pemerintah Belanda kemudian melakukan penyelidikan terhadap kondisi VOC dan berhasil mengungkapkan kebangkrutan, skandal, dan salah urus di segala segi. Kemudian, secara resmi Pemerintah Belanda membubarkan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tanggal 1 Januari 1800. Wilayah-wilayah yang dikuasai VOC, kini menjadi milik Pemerintah Belanda.⁴ Wilayah-wilayah VOC saat keruntuhannya tak banyak, terbatas hanya di pulau Jawa. Sedangkan beberapa wilayah yang dulunya dikuasai VOC jatuh ke tangan Inggris, misalnya; koloni di Tanjung Harapan dan Srilangka. Selain itu, Pemerintah Belanda juga harus menanggung hutang-hutang VOC sebesar 134 juta gulden.⁵

Secara politis, peralihan kekuasaan pasca VOC dan penerapan sistem mana yang akan dijalankan di Hindia-Belanda menjadi kemelut di kalangan elit pemerintah Belanda. Berangkat dari pengalaman semasa VOC, timbul suatu kesadaran baru di kalangan idealis progresif dari sayap liberal. Sistem feodal yang pernah dimanfaatkan VOC bukan saja menjadi sasaran kritik tetapi sedapat

² Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1988, hlm. 12.

³ C.R. Boxer, *Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799 (terjemahan)*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 146.

⁴ M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009, hlm. 168.

⁵ C.R. Boxer, *op. cit.*, hlm. 146-147.

mungkin untuk diatasi. Kelahiran kaum liberal di negeri Belanda dengan segala gagasannya, menimbulkan pertentangan dengan kaum konservatif yang hendak meneruskan konsep dasar politik ekonomi yang pernah dipakai VOC.⁶

Konsep dasar politik ekonomi VOC menjadi perdebatan di antara elit pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19. Perdebatan berkisar pada penilaian efektivitas saluran feodal (tradisional lokal) sebagai perangkat eksploitasi, yang secara permanen telah digunakan oleh VOC sepanjang sejarah hidupnya. Dalam sistem tradisional yang dipakai oleh VOC, arus barang dan jasa dari bawah diorganisasikan melalui peran para penguasa setempat. Rakyat harus memenuhi tuntutan dari dua *ndoro* (tuan, majikan, penguasa) sekaligus, yakni tuan feodal dan VOC.⁷

Sistem feodal yang terus berlangsung seperti itu menyebabkan semakin beratnya beban yang harus ditanggung rakyat. Rakyat harus memenuhi tuntutan dari penguasa feodal pribumi dan VOC yang semua pemenuhannya bersifat wajib. Sistem dan struktur feodal yang diperkuat oleh politik eksploitasi VOC dinilai menjadi penyebab keterbelakangan rakyat, karena sistem yang demikian secara struktural mematikan semua hasrat kerja dan usaha rakyat.⁸ Kepada rakyat praktis tidak diperkenalkan konsep usaha bebas, sehingga perspektif kewirausahaan tidak muncul.

Sistem eksploitasi semasa VOC beserta akibat-akibat yang menyertainya ditentang oleh kaum liberal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka Dirk van

⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 Dari Emporium sampai Imporium*, Jakarta, PT Gramedia, 1987, hlm. 300.

⁷ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 140.

⁸ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 290.

Hegendorp mengusulkan kepada pemerintah agar terciptanya perubahan dalam hal pengelolaan tanah jajahan. Selain itu Dirk van Hegendorp juga mengusulkan agar kedudukan dan penguasa daerah lainnya diatur kembali, penyerahan wajib diganti dengan pajak berupa hasil bumi dan uang kepala.⁹ Harapannya, rakyat akan lebih giat menanam dan menghasilkan komoditi ekspor. Peningkatan hasrat kerja rakyat akan mendorong perkembangan pemasaran dan kemajuan produksi ekspor. Disamping itu, kehidupan rakyat jajahan secara perlahan dapat diperbaiki.

Namun, usulan dari sayap liberal mendapat kritikan dan ditentang oleh kalangan konservatif yang mengagumi efektivitas sistem politik eksploitasi VOC. Mereka justru dengan tegas berkeinginan melanjutkan dan menerapkan kembali sistem yang pernah dipakai oleh VOC. Karena mereka beranggapan bahwa sistem tradisional yang dipakai VOC, merupakan metode atau cara yang paling realistis dijalankan untuk kondisi Indonesia (Jawa) pada saat itu.¹⁰ Meski kedua pihak saling bertentangan secara prinsip, sesungguhnya tujuan mereka sama dalam soal kolonialisme, negara jajahan perlu memberikan keuntungan bagi negeri induk.

Berpijak dari penjelasan di atas, pengalaman-pengalaman pada masa VOC telah menimbulkan kesadaran baru bagi kalangan liberal, yang merupakan terobosan ke arah modernisasi di tanah jajahan, meski sejatinya tidak bisa lepas dengan kepentingan politik dan ekonomi kolonial sendiri. Terlepas dari itu, meski sekitar tahun 1800 telah diambil beberapa tindakan seperti yang telah dipaparkan di atas, namun sebelum Daendels tiba di Jawa tahun 1808 belum diadakan reformasi atau pembaharuan umum di Indonesia (Jawa).

⁹ *Ibid.*, hlm. 290.

¹⁰ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 140.

Seperti halnya Drik van Hegendrop, Daendels juga dijiwai oleh ideologi yang sama. Daendels adalah seorang pengagum paham liberalisme. Daendels dapat dikatakan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pertama yang menjalankan pimpinan pemerintahan di tanah jajahan khususnya Jawa berdasarkan ide-ide liberalisme. Tetapi jika kita mengikuti sepintas lalu jalannya sejarah selanjutnya, maka ciri yang utama dari padanya ialah, bahwa pengaruhnya kian tahun mengarah ke intensifnya eksploitasi sumber daya.

Gerak pemerintahan Daendels tidak hanya harus setia kepada ideologinya, tetapi juga harus mengindahkan tugas-tugas penting aktual darurat yang tidak mungkin dihindarinya.¹¹ Terlebih keadaan perang yang terus menerus di Eropa sejak tahun 1800, kini mengancam wilayah koloni di Jawa. Karenanya, tidak mengherankan jika realisasinya Daendels menjadi sangat otoriter. Keberhasilan praktik kolonialnya akan ditentukan oleh kondisi dan kekuatan pemaksa yang dapat diciptakan oleh otoritas kolonial.

Terlebih jika didapatkan pada kondisi negeri induk dan keadaan di tanah jajahan pada masa itu, maka pemerintah kolonial (Belanda) condong memilih kebijaksanaan politik kolonial konservatif yang dianggap realistis dan mudah dilaksanakan. Sistem kerja paksa dan penyerahan wajib dianggap lebih cocok dengan kondisi masyarakat tanah jajahan (Jawa), karena itu cukup beralasan untuk dijalankan. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa gagasan liberal diabaikan. Dalam prakteknya idealisme liberal dilaksanakan oleh para pendukungnya di

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141.

tengah-tengah kebimbangan antara meneruskan politik konservatif dan realisasi liberalisme.

Situasi demikian semakin mencekam, sistem kolonial beserta sistem eksploitasinya tetap membelenggu rakyat pribumi. Proses eksploitasi atau pengurusan sumber daya terus berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Karya bakti kaum petani masih efektif dipaksakan melalui penyerahan wajib dan kerja wajib. Kenyataan ini dengan sendirinya semakin membuat rakyat menderita. Begitu pula, sebagaimana yang telah dipaparkan, langgengnya perjalanan kolonial beserta sistem eksploitasinya tidak lepas dari interaksi faktor-faktor internal dan eksternal, yang dalam artian menggambarkan keterlibatan para elit lokal.

Terlepas pada fakta-fakta di atas atau sebagaimana fakta bahwa masing-masing generasi menulis sejarahnya sendiri, maka penulis terpanggil merekonstruksikan sejarah eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal H.W. Daendels di Jawa tahun 1808-1811. Rekonstruksi singkat di atas merupakan pengetahuan dasar. Sebagai pengantar agar lebih mempermudah membahas sistem eksploitasi pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah tersebutkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa?

2. Bagaimana proses eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa?
3. Bagaimana dampak eksploitasi pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa?

C. Tujuan Pemulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini secara umum diarahkan untuk menjawab masalah yang berkaitan tentang Eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811. Dengan demikian tujuan penulisan ini adalah:

- a. Menjelaskan latar belakang penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811.
- b. Mendiskripsikan proses eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.
- c. Menjelaskan dampak eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya Sejarah Indonesia tentang *Eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811)*, yang difokuskan di pulau Jawa.

b. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca mengenai sejarah Indonesia tentang Eksploitasi Sumber Daya pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811. Penulisan ini juga bisa menambah koleksi kepustakaan khususnya karya ilmiah dan dapat juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa.

c. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan bisa berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan sejarah di Indonesia. Menambah referensi ilmiah khususnya sejarah tentang Eksploitasi Sumber Daya pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.

d. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca tentang sejarah Eksploitasi Sumber Daya pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang *"Eksploitasi Sumber Daya Pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa Tahun 1808-1811"* ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

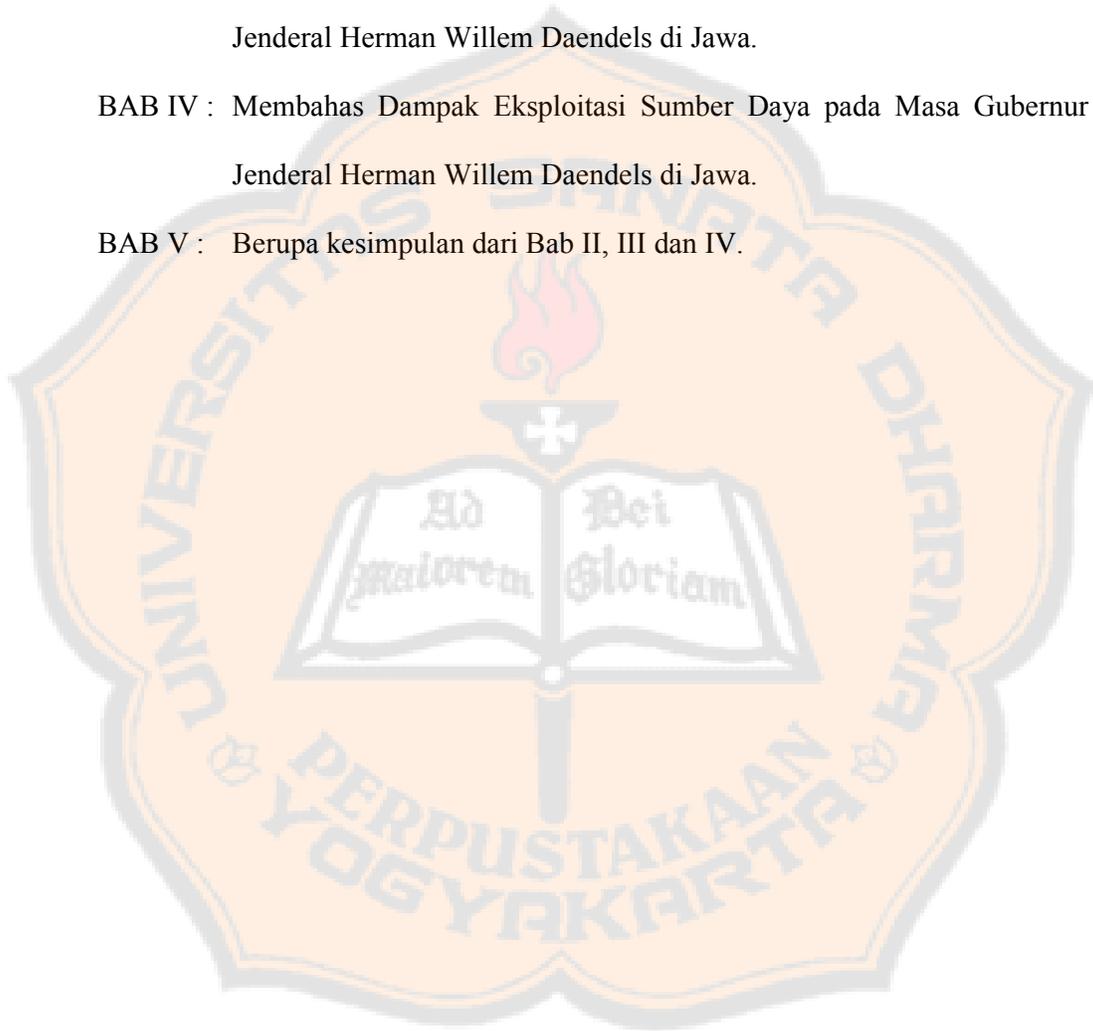
BAB I : Berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas latar belakang penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.

BAB III : Membahas Proses Eksploitasi Sumber Daya pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.

BAB IV : Membahas Dampak Eksploitasi Sumber Daya pada Masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.

BAB V : Berupa kesimpulan dari Bab II, III dan IV.



BAB II
PENUGASAN GUBERNUR JENDERAL
HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA

Membicarakan latar belakang pemerintahan Daendels di Hindia-Belanda, memang tidak dapat dilepaskan dengan kondisi politik di Eropa pada masa itu. Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya (Bab I), menjelang akhir abad ke-18, hampir bersamaan dengan tutup bukunya VOC, negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis (1795-1813). Rezim pemerintahan monarki wangsa *Oranje* berhasil digulingkan oleh kaum Patriot Belanda, dengan bantuan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Bersamaan dengan itu, kaum Partiot berhasil mendirikan Republik Bataaf. Berdasarkan ringkasan di atas, maka pada Bab II ini pembahasan akan dimulai dengan mendeskripsikan: Kondisi politik menjelang penugasan Daendels dan latar belakang penugasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.

A. Kondisi Menjelang Penugasan Daendels

1. Runtuhnya VOC

Setelah lebih dari satu setengah abad berkuasa di Indonesia, kegemilangan VOC mulai meredup. pada akhir abad ke-18, rempah-rempah yang membuat orang Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia merosot nilainya dalam perdagangan dunia. Monopoli cengkeh telah mengecil dan mengantarkan VOC ke ambang kehancuran. Ketika pada tahun 1769-1772 ekspedisi Prancis berhasil merampas paksa sejumlah tanaman cengkeh di Ambon untuk diperdagangkan di

Mauritius dan koloni-koloni Prancis lainnya,¹³ keuntungan yang diperoleh VOC semakin kecil, kasnya semakin menipis, sedangkan anggaran belanja VOC semakin besar.

Lembaga dagang semi negara yang memiliki hak monopoli dan ditopang oleh kekuatan senjata ini, tidak bisa mempertahankan keberadaannya lagi. Pemerintah Belanda secara resmi membubarkan VOC pada tanggal 1 Januari 1800.¹⁴ Keputusan pemerintah Belanda membubarkan VOC bukan hanya lantaran ketidakmampuannya meraup keuntungan, tetapi lebih dari itu. Keserakahan VOC membuat penguasa lokal tidak bersungguh-sungguh membantu VOC dalam perdagangan, akibatnya rempah-rempah yang diperoleh VOC tidak seperti yang diharapkan.

Selain itu perang yang terjadi antara Belanda dengan Inggris demi memperebutkan hegemoni perdagangan mengakibatkan kerugian besar sehingga mempercepat kebangkrutan VOC.¹⁵ Selain itu, kekuatan militer VOC di laut sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan laut Inggris. Kekuatan armada laut Inggris berhasil mengungguli kekuatan Belanda yang kemudian mengakhiri monopoli VOC setelah menanggung kekalahan dalam perang pada tahun 1784. Konsekuensinya pihak Belanda mengizinkan Inggris berlayar di Indonesia.

VOC juga sangat kekurangan tenaga kerja atau pegawai-pegawai yang setia, jujur, profesional dan kompeten di bidangnya. Banyak pejabatnya adalah orang-

¹³ M.A. Twin (dkk), *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2013, hlm. 333.

¹⁴ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 168.

¹⁵ Nugroho Notosusanto (dkk), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 1.

orang Skotlandia, Polandia, Swedia, Denmark, Norwegia, Prusia, Batvia, Wuttemberg, Swiss, Irlandia, Inggris dan seterusnya, termasuk orang-orang pribumi yang dipekerjakan sebagai pegawai-pegawai di dalamnya. Hal ini tidak jarang membuat VOC mengalami kerugian jika terjadi kesalahan perhitungan-perhitungan pasar. Minimnya gaji yang diberikan VOC kepada para pegawainya itu juga mengakibatkan setiap orang mencari keuntungan tambahan lewat pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan swasta dengan melanggar monopoli VOC.¹⁶

Situasi demikian makin diperkeruh dengan perilaku pejabat-pejabat VOC yang buruk bahkan menurut ukuran masa itu, mulai mengancam stabilitas VOC. Buruknya praktek dari sistem pemerintahan VOC diperparah dengan merebaknya korupsi di kalangan para pegawainya, mulai dari pegawai rendah hingga pegawai tinggi. Keserakahan akan harta dan miskinnya integritas para pejabat VOC menyuburkan korupsi.

Menjamurnya tindakan-tindakan yang menggerogoti eksistensi VOC, mengantarkan VOC ke dalam lubang hitam. Memburuknya kekuasaan VOC pada akhir abad ke-18 ini membuat negeri Belanda menghapuskan VOC dan mengambil alih kekuasaannya atas Nusantara. Pada tahun 1795 otoritas VOC dicabut oleh *Staten Generaal* dan dengan pasal 247 *Staatsregeling* 1798 VOC dinyatakan bubar dengan ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya. Kebangkrutan VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni 134 juta *gulden*. Akibatnya, semua hak milik dan hutang VOC ditanggung oleh pemerintah

¹⁶ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 199-241.

Hindia-Belanda.¹⁷ Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan VOC menandai pergantian pemerintahan dari VOC ke Pemerintah Hindia-Belanda.

2. Pemerintah Hindia-Belanda

Jika kita lihat dan telaah kembali, nampak jelas bahwa pada dasawarsa awal abad ke-17 sampai akhir abad ke-18 Nusantara tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Setelah akhir abad ke-18 Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC ini mengalami kemunduran dan tutup buku pada tahun 1800. Kekuasaan VOC atas Indonesia harus beralih tangan langsung ke pemerintah Belanda (Republik Bataaf). Dengan berakhirnya kekuasaan VOC, maka sejak 1 Januari 1800 Indonesia secara langsung dijajah oleh negeri Belanda, dan disebut dengan Hindia-Belanda.¹⁸

Kepindahan tampuk pemerintahan ke pemerintah Belanda tidak dapat diharapkan membawa perbaikan. Belanda dihadapkan kepada perang-perang besar yang dilancarkan negara tetangganya. Selain itu Kaum Patriot Belanda yang mengagung-agungkan Revolusi Prancis berusaha menggulingkan sistem pemerintahan monarki. Pada tahun yang hampir bersamaan dengan kejatuhan VOC, kerajaan Belanda di bawah Willem V jatuh ke tangan Prancis. Negeri Belanda tanpa perlawanan yang berarti berhasil ditaklukan oleh Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte pada tahun 1795. Setelah itu, Napoleon Bonaparte

¹⁷ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta. KPG, 2008, hlm. 237.

¹⁸ A.K. Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*, Yogyakarta, USD, 2006, hlm. 99.

manempatkan adiknya Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda pada tahun 1806.¹⁹

Peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia-Belanda, menghadapkan pemerintah Belanda kepada persoalan sistem mana yang akan dipergunakan di tanah jajahan?. Tentunya agar daerah jajahan memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negara induknya dengan tidak melepaskan tujuan pokok politiknya, yaitu mengeksploitasi daerah jajahan.

Tata kelola administrasi terhadap wilayah jajahan ini sempat menjadi problem tersendiri di kalangan elit birokrat pemerintah Belanda, yaitu antara kaum liberal dengan kaum konservatif. Di kalangan kaum liberal berkembang gagasan yang didasarkan atas kebebasan dan kesejahteraan umum dari pendudukan. Mereka mengusulkan pemerintahan langsung serta sistem pajak. Sementara itu kaum konservatif tetap ingin mempertahankan sistem dagang dari politik VOC.²⁰ Mereka beranggapan bahwa sistem yang dipakai VOC merupakan metode yang paling realistis untuk Indonesia pada waktu itu.²¹ Ditambah lagi didasarkan pada keadaan perekonomian Belanda saat itu, akibat perang yang terus-menerus perdagangan Belanda mengalami kemunduran. Negara jajahan yang berfungsi sebagai penghasil tanaman yang dapat dijual ke Eropa merupakan pemasok keuangan bagi negara induk.²² Dengan demikian politik kolonial konservatif dianggap paling menguntungkan dan paling mungkin dilaksanakan.

¹⁹ M.C. Riekelefs, *op. cit.*, hlm. 243.

²⁰ Nugroho Notosusanto, (dkk), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 2.

²¹ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 140.

²² Nugroho Notosusanto (dkk), *op. cit.*, hlm. 2.

Masalah persoalan politik kolonial mana yang akan diterapkan masih menimbulkan keraguan dalam menjalankannya, terombang ambing oleh ideologi besar antara melanjutkan politik VOC atau berdasarkan prinsip liberal yang mencapai kemenangan gemilang dalam Revolusi Prancis.²³ Hal ini membuat sistem dagang tetap dipertahankan dengan penyerahan paksa serta kontingen seperti yang telah dijalankan VOC selama berabad-abad dan ternyata merupakan cara eksplotasi yang membuat daerah jajahan produktif.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan peralihan kekuasaan langsung ke tangan pemerintah Belanda tidak menimbulkan perubahan yang berarti. Sistem politik dan administrasi yang diterapkan pemerintah Hindia-Belanda (Republik Bataaf) tidak berbeda dengan sistem yang diterapkan VOC. Belanda melanjutkan politik tradisional Kompeni dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan bagi negeri Belanda. Sistem pemerintahan tidak langsung, para pembesar pribumi tetap mengurus perkara pribumi. Pegawai-pegawai VOC tetap menjadi pegawai pemerintah Belanda.

B. Penugasan Daendels di Jawa

1. Latar Belakang Penugasan Daendels

Semboyan *liberte, egalite* dan *fraternite* (kebebasan, persamaan dan persaudaraan) tidak lahir begitu saja tetapi melalui revolusi di Prancis (1789), yang jika dijelaskan akan sangat panjang. Singkatnya, benih-benih revolusi yang ditanamkan kaum nasionalis, di kemudian hari menggerakkan rakyat Prancis berbondong-bondong menyerbu Banteng Bastille, karena hampir semua lapisan

²³ Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, hlm. 300.

²⁴ Nugroho Notosusanto, dkk, *op. cit.*, hlm. 1.

rakyat (kecuali golongan rohaniwan atas) Prancis menanggung penderitaan dalam berbagai bidang (sosial, ekonomi, politik) dan puncak penderitaan itu mendapat jalan keluar lewat revolusi.²⁵

Revolusi yang dilancarkan kaum nasionalis ini membuka era baru dalam sejarah Prancis. Deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dijunjung tinggi dalam negara bangsa, ide demokrasi, kebebasan, persamaan dan persaudaraan,²⁶ terus bekumandang ke seluruh wilayah Eropa, termasuk Belanda.

Revolusi yang terjadi di Prancis telah mengilhami kaum Patriot Belanda untuk mulai melakukan propaganda menentang rezim *Staadhouder* Willem V dari dinasti Oranje yang saat itu berkuasa. Kaum Patriot berusaha menggulingkan sistem pemerintahan monarki dan mendirikan pemerintahan Republik. Salah satu tokohnya ialah Herman Willem Daendels.

Pada tahun 1795, negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis²⁷, sampai dengan tahun 1813. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda tanpa perlawanan yang berarti. Berkat bantuan pemerintah Prancis, kaum Patriot Belanda yang mengagumi Revolusi Prancis berhasil melebur sistem monarki menjadi Republik Bataaf tahun 1795. Aneksasi Belanda oleh Prancis ini sangat berdampak pada wilayah koloni Belanda di Hindia-Timur.

Prancis sangat berkepetingan dengan wilayah Belanda. Hal ini disebabkan karena wilayah Belanda merupakan akses yang paling mudah bagi Inggris untuk

²⁵ Sutarjo Adisusilo, J.R, *Sejarah Pemikiran Barat dari yang Klasik samapi yang Modern*. Yogyakarta, USD, 2005, hlm. 124.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

²⁷ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 243.

menuju ke daratan Eropa. Perlu diketahui bahwa kedua negara (Prancis dan Inggris) tersebut mempunyai sejarah rivalitas yang cukup panjang. Prancis dan Inggris saling berlomba untuk menunjukkan superioritas dan prestise sebagai negara imperialis terkuat, termasuk dalam hal kepemilikan tanah jajahan (sepaimana yang terjadi di wilayah Nusantara). Karena itu menjelang akhir abad ke-18 demi pertimbangan keamanan Prancis, khususnya untuk menyelamatkan ide Revolusi Prancis dari ancaman negara lain, Prancis merasa perlu untuk menjadikan Belanda sebagai tameng bagi Prancis.

Mengingat persetujuan antara Prancis dan Inggris semakin dahsyat, sementara Belanda merupakan negara boneka Prancis, mau tidak mau Belanda terlibat pada pertentangan antar kedua negara adidaya itu. Di awal tahun 1800-an, Prancis dan Inggris mengkonsentrasikan kekuatan perangnya di wilayah India dan Mesir. Kini perang-perang Napoleon di Eropa telah merembet ke Indonesia.

Disamping keinginan Inggris yang begitu besar atas monopoli terhadap wilayah Asia termasuk Indonesia, merembetnya peperangan Napoleon ke Indonesia didukung oleh kebijakan Raja Willem V. Pada waktu penaklukan negeri Belanda, Raja Willem V dari negeri Belanda berhasil melarikan diri ke Kew (Inggris) dan mengeluarkan “surat-surat Kew”, sebuah dokumen yang memerintahkan kepada para pejabat Belanda untuk menyerahkan wilayah mereka kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Berdasarkan otoritas ini, dengan kapal, pasukan, serta senjata yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pihak Belanda di Indonesia, maka Inggris berhasil merebut atau diberikan beberapa pos-pos di Indonesia kecuali Jawa. Pada tahun 1795 Inggris berhasil

menduduki Padang yang dulunya pernah mereka duduki, dan Malaka, lalu Ambon dan Banda pada tahun 1796. Sejak tahun 1795, Inggris meningkatkan blokadanya terhadap Batavia. Kemudian pada tahun 1806 Inggris berhasil menguasai Tanjung Harapan.²⁸

Sekarang, Jawa berada dalam posisi terancam. Inggris berniat merebut dan menguasai Jawa. Pemerintah Belanda (Republik Bataaf) terbukti tidak mampu mempertahankan wilayah koloni di Tanjung Harapan, yang jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1806. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Bataaf dan menggantinya dengan kerajaan Belanda. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806.²⁹ Pendirian kerajaan Belanda didasarkan atas kepentingan Prancis untuk melindungi wilayahnya termasuk wilayah koloninya.

Penunjukan Raja Louis (Lodewijk) Napoleon sebagai raja Belanda diharapkan mampu untuk mempertahankan wilayah koloni dari Tanjung Harapan ke wilayah Hindia-Timur. Dengan banyaknya laporan tentang keadaan wilayah koloni di Hindia-Timur yang diterima oleh Raja Louis, maka dirasa perlu untuk segera mencari calon gubernur jendral yang mampu mempertahankan martabat Prancis di Hindia-Timur. Untuk mengatasi masalah itu, Raja Louis merasa bahwa Jawa perlu dipimpin oleh seorang militer yang kuat, yang mampu melakukan perubahan, serta mampu mempertahankan pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Dengan pertimbangan pengalaman dan kemampuan militer, Raja Louis

²⁸ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 247.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 243.

kemudian memanggil Herman Willeam Daendels, mantan panglima Legion Etrangere yang telah berjasa banyak dalam menurunkan tahta Stadhouder Willem V dan pendirian Republik Bataaf. Menurut Raja Louis, Herman Willeam Daendels lah yang mampu mempertahankan martabat Prancis dalam membenahi dan mempertahankan wilayah Hindia-Belanda.

Raja Louis akhirnya mengeluarkan keputusan mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia-Timur pada 28 Januari 1807. Pada 9 Februari 1807, Daendels berangkat menuju Jawa dengan terlebih dahulu singgah di Paris untuk menghadap Kaisar Napoleon Bonaparte di istana Tuileries. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan memakan waktu kurang lebih sepuluh bulan, akhirnya Daendels mendarat di pelabuhan Anyer pada tanggal 1 Januari 1808.³⁰ Sejak saat itu ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, menggantikan gubernur jenderal yang lama Albertus Henricus Wiese.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa, Herman Willem Daendels, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda pada tahun 1808-1811 dikenal dengan beberapa julukan. Ada yang memanggil “Gubernur Guntur/Bledek, dan Marseklar Besi/Tangan Besi”, begitulah akrab sapaan masyarakat Jawa mengenal Daendels. Pemberian julukan tersebut sesuai dengan karakter kepemimpinan Daendels yang otoriter, yang memerintah sebagai Gubernur Hindia-Belanda (1808-1811).

³⁰ A.G Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta, Kanisius, 1973, hlm. 247.

2. Tujuan Penugasan Daendels

Belanda kini telah menjadi negeri vasal Prancis (1806). Negeri Belanda yang merupakan negara kerajaan di bawah pemerintahan Louis Napoleon selalu mendapatkan ancaman dari Inggris beserta sekutunya. Penempatan Raja Louis di Belanda tidak terlepas dari upaya Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, memblokade wilayah daratan Eropa agar tidak didarati kapal-kapal Inggris, baik untuk kepentingan perdagangan maupun kepentingan politik. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, menganggap bahwa wilayah pantai Belanda merupakan satu-satunya wilayah bagi Inggris dan sekutunya yang masih memungkinkan dijadikannya akses ke Eropa. Oleh karena itu, Napoleon Bonaparte menempatkan adik kandungnya menjadi Raja Belanda untuk menangkis upaya Inggris.

Upaya Inggris mendaratkan pasukannya di wilayah Belanda, selalu mendapatkan perlawanan dari pasukan gabungan Belanda-Prancis. Terlebih ketika Napoleon Bonaparte melancarkan politik kontinentalnya, yang memblokade Inggris di wilayah Eropa, maka Inggris membalas dengan mengultimatum akan merampas semua wilayah koloni Belanda yang ada di timur Tanjung Harapan.

Lord Minto ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Britis India tahun 1807. Dia menerima instruksi dari pemerintahnya agar kekuasaan Prancis harus di usir dari semua wilayah yang didudukinya di Samudra Hindia, seperti pulau Borbon (sekarang pulau Reunion) dan pulau France (sekarang pulau Mauritius) dan Hindia-Belanda khususnya Jawa.³¹ Ultimatum ini terbukti dengan keberhasilan Inggris merebut Tanjung Harapan tahun 1806, dan Mauritius tahun 1809.

³¹ Jean Rocher & Iwan Santosa, *Sejarah Kecil Indonesia Prancis*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 23.

Kenyataan ini disadari oleh Belanda, sehingga bagi raja Belanda dan Kaisar Prancis, Daendels lah orang yang tepat yang bisa diandalkan mampu mempertahankan pulau Jawa dan menjaga kehormatan Prancis.

Keadaan pulau Jawa saat kedatangan Daendels (Januari 1808) sangat genting, karena Inggris telah melakukan blokade laut atas pulau Jawa, yang memutus hubungan Hindia-Timur dengan negeri Belanda. Situasi perang ini lantas melatarbelakangi kedatangan Daendels di Indonesia (Jawa) selama kurun waktu \pm 3 tahun 4 bulan. Mengenai tugas-tugas atau misi Daendels sebagai Gubernur Jendral di Jawa, disebutkan sebagai berikut;

.....Dalam “instruksi untuk Gubernur Jenderal atas Wilayah Asia milik Raja Yang Mulia” yang dikeluarkan Raja Louis pada 9 Februari 1807, 12 dari 37 pasal berhubungan dengan urusan militer dan pasal 14 menyatakan bahwa reorganisasi tentara adalah kewajibannya yang pertama. Hal-hal lain yang secara khusus diperintahkan kepadanya ialah: penyelidikan terhadap kemungkinan penghapusan tanaman paksa dan penyerahan paksa kopi, perbaikan kondisi kehidupan penduduk asli dan, terutama, budak-budak, serta yang terakhir, perbaikan kondisi saniter di Batavia, atau, jika tidak mungkin, pemindahan ibukota ke kabupaten yang lebih sehat di Jawa.³²

Dalam upayanya tersebut Daendels menerapkan sentralisasi kekuasaan dengan karakter pemerintah yang otoriter. Sasaran yang akan dia capai adalah semua pejabat harus bertanggung jawab secara vertikal dengan kekuasaan terakhir dipegang secara mutlak oleh Gubernur Jenderal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembangkangan yang berdampak pada kegagalan proyek pertahanan yang akan dibangunnya. Oleh karena itu tindakan disiplin yang keras diterapkan oleh Daendels dalam melaksanakan semua programnya.

³² Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 280.

BAB III

PROSES EKSPLOITASI SUMBER DAYA PADA MASA GUBERNUR JENDERAL HERMAN WILLEM DAENDELS DI JAWA

Proses eksploitasi sumber daya (barang dan jasa) berlangsung sejajar dengan fase-fase perkembangan politik kolonial yang melatarbelakanginya. Perubahan (reformasi) dan kebijakan politik rezim Daendels, berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial-ekonomi maupun kelembagaan di Jawa. Upaya dan kebijakan-kebijakan Daendels semakin mengoptimalkan kekuasaan kolonial ke arah ‘intensifikasi eksploitasi³²’ sumber daya. Eksploitasi diwujudkan dalam bentuk penyerahan wajib dan kerja wajib (rodi). Sistem penyerahan wajib bisa membantu perbendaharaan pemerintah kolonial, dan kerja paksa dioptimalkan sebagai penyokong pembangunan kolonial. Hal serupa dirasa cocok untuk mengelola Indonesia sebagai daerah yang mengutungkan bagi negeri induk.

A. Konsep Eksploitasi

Pada awal abad ke-19, yaitu tahun 1808 berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa dan Eropa. Jauh sebelum itu, pemerintahan monarki, dinasti Orenje telah berhasil digulingkan. Negara Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis (1795-1813). Kemudian pada tahun 1806 Louis Napoleon yang merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte naik tahta menempati tonggak

³² Anton Haryono, *op. cit.*, hlm.146.

pemerintahan di Kerajaan Belanda. Pada tahun 1807, Raja Louis memutuskan untuk mengirim Daendels ke Batavia sebagai Gubernur Jenderal (1808-11).³³

Keputusan Raja Louis Napoleon mengirim Daendels diharapkan mampu mengemban tugasnya yang akan mengubah keadaan darurat di Jawa. Daendels merupakan pengagum, sekaligus pewaris intelektual Revolusi Prancis. Ia seorang militer yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menentang tatanan feodal. Sejak menjabat sebagai Gubernur Hindia-Belanda 1808, Daendels melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Raja Louis. Sebagaimana karakteristik Daendels yang merupakan pengagum Napoleon, instruksi yang diterimanya dijalankan berdasarkan prinsip utama dalam Revolusi Prancis.

Konsep atau ide-ide (gagasan) revolusi Daendels merupakan cara untuk membenahi kondisi administrasi Jawa pasca VOC dan Gubernur Jenderal sebelumnya, yang tidak berdampak signifikan bagi kondisi politik Prancis kala itu. Sebagai seorang penganut liberalisme, Daendels ingin memperjuangkan diterapkannya kebebasan perseorangan (dalam hak milik tanah), bercocok tanam, memanfaatkan hasil tanaman, berdagang, maupun dalam peradilan di tanah jajahan.³⁴ Dalam konteks ekonomi-politik moderen, liberalisme ingin mengatakan bahwa hidup perekonomian merupakan bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian memang seharusnya berdasarkan pasar bebas (free market). Sedangkan konsepsi politik mengandung

³³ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 243.

³⁴ Sartono & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Aditya Media, 1991, hlm. 42.

makna, menentang segala bentuk pemerintahan yang otoriter, seperti dalam monarki absolut atau diktatur. Fahaman ini mencurigai segala bentuk kuasa, karena kuasa cenderung berkembang menjadi semakin besar dan menindas, maka harus diberi saluran dan dibatasi.³⁵

Karenanya, Daendels ingin memberantas sistem feodal yang diperkuat VOC. Untuk mencegah penyalahgunaan, kekuasaan, serta hak-hak bupati dibatasi, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat.³⁶ Daendels juga ingin melakukan perubahan-perubahan liberal, dengan merombak sistem pemerintahan feodal dan meletakkan landasan sistem birokrasi Barat, pengurangan kekuasaan bupati, meluaskan pengadilan pribumi, menyederhanakan upacara-upacara di kerajaan, memajukan pertanian dan perdagangan, dan memberantas kecurangan pemungutan kontingen, penyerahan paksa dan kerja paksa.³⁷ Cita-cita ini sejalan dengan pendahulunya Dirk van Hegendrop dan tidak mudah bagi Daendels untuk melaksanakan semua gagasan ini, apa lagi dengan waktu yang relatif singkat.

Pada dasarnya cita-cita revolusi sudah cukup baik, akan tetapi kondisi pada waktu itu menjadi hambatan bagi penerapan ide tersebut. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan ide-ide liberal ini. Keadaan Jawa yang masih berlaku jaman VOC menjadi hambatan pokok pelaksanaan ide tersebut. Keadaan yang berlaku zaman VOC tersebut adalah, bahwa kedudukan para bupati sangat berakar kuat dalam masyarakat. Mereka memiliki kebebasan besar untuk

³⁵ Sutarjo Adisusilo, J.R, *op. cit.*, hlm. 56-57.

³⁶ Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, hlm. 291.

³⁷ Sartono & Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 42.

mengatur rakyat menurut selera mereka sendiri, dan mereka atau penguasa daerah lainnya masih memegang peranan besar dalam perdagangan. Sedangkan faktor penghambat kedua terdapat dalam tugas pemerintahan Daendels sendiri yang perlu mempertahankan pulau Jawa.³⁸

Para Bupati berperan sebagai perantara memperoleh keuntungan yang berupa prosenan kultur, ialah persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib kontingen yang dipungut dari rakyat. Sistem ini mengakibatkan pasar bebas tidak berkembang dan tidak muncul suatu golongan pedagang, suatu unsur yang sosial yang lazim berperan penting dalam proses liberalisasi masyarakat feodal. Perlu ditambahkan, dalam struktur feodal yang menempatkan para bupati dalam kedudukan yang sangat kuat dalam masyarakat itu, setiap tindakan tidak dapat berjalan tanpa kerja sama dengan mereka.³⁹ Akibatnya, eksploitasi rakyat berlangsung lebih intensif.

Misi Daendels yang pertama dan yang terakhir menuntut pengeluaran dari perbendaharaan dan juga pengerahan tenaga yang banyak. Sementara kondisi Jawa dengan sistem birokrasinya sangat bersinggungan dengan gagasan revolusi. Dengan demikian, apabila penjabaran kebijakan dilaksanakan sesuai dengan cita-cita revolusi, maka memunculkan kecenderungan terhadap berkurangnya pemasukan pemerintah. Kurang lebihnya, hal ini bisa mendatangkan dilema bagi Daendels dalam menjalankan pemerintahan, dan berpotensi menyudutkan dirinya di penghujung masa pemerintah. Mengenai keseluruhan misi Daendels tersebut ialah:

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 291.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 291.

.....Dalam “instruksi untuk Gubernur Jenderal atas Wilayah Asia milik Raja Yang Mulia” yang dikeluarkan Raja Louis pada 9 Februari 1807, 12 dari 37 pasal berhubungan dengan urusan militer dan pasal 14 menyatakan bahwa reorganisasi tentara adalah kewajibannya yang pertama. Hal-hal lain yang secara khusus diperintahkan kepadanya ialah: penyelidikan terhadap kemungkinan penghapusan tanaman paksa dan penyerahan paksa kopi, perbaikan kondisi kehidupan penduduk asli dan, terutama, budak-budak, serta yang terakhir, perbaikan kondisi saniter di Batavia, atau, jika tidak mungkin, pemindahan ibukota ke kabupaten yang lebih sehat di Jawa.⁴⁰

Dengan semangat Revolusi yang berkobar-kobar, Daendels membawa harapan bahwa ia akan membela nasib rakyat Indonesia yang tertindas. Tetapi ini merupakan spekulasi yang keliru. Meskipun gagasan-gagasan tersebut membuahkan hasil, tetapi dalam prakteknya terlepas dari cita-cita revolusi. Daendels, yang merupakan seorang penganjur revolusi dalam prakteknya berubah menjadi seorang diktator. Daendels cenderung memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Ketika itu pula, semangat revolusi Daendels di Indonesia lekas luntur, dan berubah menjadi seorang diktator yang kejam, sehingga rakyat menjadi sasaran eksploitasi bagi penerapan kebijakan-kebijakan Daendels.

Dengan demikian, pada masa pemerintahan Daendels sistem tradisional masih berjalan. Karena suatu keadaan yang mendesak dalam mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Penyerahan wajib dan kerja wajib terus berlangsung untuk mendukung pelaksanaan pertahan militer dan pembangunan di Jawa. Dari penyerahan wajib inilah diperoleh sumber pendanaan yang sangat besar, dan dari pengerahan tenaga rakyat berbagai kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan.

⁴⁰ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 280.

Semua keperluan itu hanya bisa diperoleh dengan sistem tradisional yang berjalan di Jawa yang semula ditolakny.

B. Reformasi Administrasi (*Membenahi Tata-Negara*)

1. Reformasi Tata Pemerintahan

Salah satu misi singkat pejabat Perancis-Belanda ini adalah membenahi administrasi di Indonesia. Semua reformasi ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan itu, secara teori sistem lama Kompeni dirombak dan fondasi untuk sistem baru diletakkan. Daendels secara personal tidak mau terikat pada ketetapan yang sudah ada, Ia berusaha membenahi administrasi pemerintah sepeninggal VOC. Daedeles berusaha terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang menurut pertimbangannya lebih baik dan bermanfaat.

Salah satu langkah penting Daendels, sebagai penopang konsolidasi kekuasaan untuk intensifikasi eksploitasi sumber daya, adalah mengusahakan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan di Jawa.⁴¹ Dari itulah, sejak awal kedatangannya di Jawa, gubernur baru Hindia-Belanda ini (Daendels) mengusahakan reformasi menyeluruh terhadap pemerintahan di Jawa. Tujuannya, agar tercipta sentralisasi yang paling lengkap dan baku. Untuk melaksanakannya, ia memanfaatkan sebaik mungkin kekuatannya sebagai seorang diktator. Dengan perlakuan tanpa pengertian atas segala sesuatu untuk mencapai tujuannya.

Daendels yang sangat mengagumi liberalisme yang berdasarkan ide-ide humaniter berusaha mengubah tatanan sistem pemerintahan kolonial. Daendels merombak sistem pemerintahan dan menggantinya menurut sistem birokrasi

⁴¹ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 146.

Barat.⁴² Sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaannya, Daendels membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat penguasa daerah diatur kembali, termasuk larangan untuk menjual belikan jabatan dihapuskan.⁴³

Daendels juga menetapkan pantai Timut laut Jawa dibagi atas daerah-daerah prefectuur, masing-masing dipimpin oleh seorang prefek berkebangsaan Eropa, dan diberi kekuasaan luas yang dijalankan di bawah pengawasan Gubernur Jenderal. Kemungkinan bupati-bupati kehilangan hak warisan yang dimilikinya, sedangkan hak mereka atas tanah jabatan, jaminan tenaga kerja dan pajak atas produksi, semuanya diturunkan jumlahnya. Sebagai gantinya mereka diangkat menjadi pejabat-pejabat penerima gaji dengan gaji dan kedudukan yang ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer.⁴⁴ Sejalan dengan dihapusnya Propinsi Pantai Timur Jawa, para residen di kerajaan-kerajaan Jawa langsung berada di bawah kekuasaan Batavia dengan gelar menteri.⁴⁵ Perampasan hak otonom ini sebenarnya sudah berlangsung sejak jaman VOC, oleh Daendels di perbaharui kembali. Dia menertibkan aparat kepegawaian Belanda yang diwariskan VOC, kemudian menggaji para pegawainya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, secara tidak langsung dalam rezim birokrasi yang diperintah, Daendels menempatkan para aristokrat Jawa (bupati atau penguasa lainnya) sebagai roda gigi (alat pemerintah), bukannya sebagai penguasa feodal terhadap rakyat. Reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh Daendels

⁴² Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 41.

⁴³ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 292.

⁴⁴ P. J. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 56-57.

⁴⁵ D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya, Usaha Nasional, 1988, hlm. 446.

merupakan suatu langkah awal yang cukup mendasar bagi sistem pemerintahan kolonial pada periode berikutnya. Daendels, membangun dasar-dasar pemerintahan langsung, yang pada tingkat tertentu berhasil mengendorkan sistem feodal Jawa.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai konsekuensi dari perubahan ini mengakibatkan menurunnya pendapatan dan status sosial Bupati di mata rakyat mereka. Dulunya mereka berkuasa dengan leluasa, kini mulai terbatas dan bahkan terlepas. Tidak kurang dari pada itu, dengan kediktatoran Daendels memperlakukan raja-raja pribumi secara kasar.

Kalau hal ini berhasil Daendels akan mendapatkan suatu pemerintahan yang sentralistik (terpusat) dan otokrasi sifatnya, dimana ia sebagai penguasa tertinggi akan bisa melaksanakan kehendaknya lewat pegawai-pegawainya termasuk para bupati. Reformasi ini merupakan langkah yang paling efektif, dimana dengan cara melakukan sentralisasi kekuasaan dan membuat kebijakan-kebijakan yang menyertainya akan menguntungkan pihak kolonial.

2. Reformasi Lembaga Peradilan

Selama rezim pemerintahannya, Daendels terus melaksanakan gagasan-gagasannya. Daendels sempat mengkritik organisasi dan lembaga peradilan di Batavia. Lembaga peradilan yang ada dinilainya masih sangat lemah, sehingga azas peradilan tidak terlaksana dengan baik. Beberapa peradilan yang sebelumnya didirikan Kompeni tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk, dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan makin lama makin tidak tertahankan.⁴⁷

Dugaan kuat terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat

⁴⁶ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 147.

⁴⁷ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 277.

lembaga peradilan karena masih adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sekelompok orang.

Untuk menjamin terlaksananya instruksi dan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah, diperlukan perombakan dan penambahan lembaga peradilan. Daendels memutuskan bahwa organisasi dan praktek peradilan di Batavia yang lama perlu dirombak. Daendels memutuskan pemisahan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Pemisahan dilakukan dalam lembaga pengadilan khusus orang-orang Jawa dengan orang-orang asing (non-Jawa).⁴⁸ Dia memberikan setiap kabupaten, dan di atas kabupaten, setiap prefektorat, pengadilannya sendiri, yang terdiri atas orang Indonesia, dengan dua orang Eropa di pengadilan-pengadilan prefektorat. Pengadilan ini khusus menangani kasus-kasus orang Jawa dan berdasarkan adat-istiadat (hukum Jawa). Sedangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan orang asing (non-Jawa) akan ditangani oleh Dewan Peradilan yang didirikan di Batavia, Semarang dan Surabaya, menurut undang-undang Hindia-Belanda yang ada.⁴⁹

Pada peradilan pribumi yang lebih rendah, pejabat-pejabat dan pendeta turut serta dihadirkan. Pengadilan-pengadilan prefektorat dipimpin oleh landdrost dengan seorang pejabat Belanda sebagai sekretaris dan sejumlah pembantu pribumi. Sistem naik banding, dari pengadilan yang lebih rendah kepada lembaga yang lebih tinggi “Dewan Pengadilan” juga telah dilembagakan.⁵⁰ Sejauh ini, Daendels berhasil meletakkan dasar reorganisasi peradilan. Kemudian masalah

⁴⁸ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 150.

⁴⁹ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 278.

⁵⁰ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 447.

peradilan terus berakar dan dikembangkan lebih jauh oleh pengganti-penggantinya.

Reorganisasi peradilan ini, merupakan satu langkah modernisasi masa itu. Tetapi sejauh masa kekuasaannya, penguasa tertinggilah yang memegang apa yang dinamakan 'keadilan'. Kebijakan ini tidak pernah dilaksanakan. Terbukti banyak pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang diabaikan oleh Daendels. Tindakan-tindakan diktatornya dimanfaatkan lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan dia dan mengakhiri kekuasaannya di Jawa.

C. Pembangunan Infrastruktur dan Politik Diktator

1. Membangun pertahanan militer

Pada awal abad ke-19, koloni-koloni Belanda tidak mempunyai kekuatan dan pertahanan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan serangan dari pasukan Inggris. Seakan dirasa sudah cukup bagi Belanda dengan hilangnya wilayah koloni di Tanjung Harapan dan Srilangka, maka keputusan penting untuk segera membangun pertahanan militer di wilayah koloni (Jawa), yang saat itu belum sempat direbut Inggris. Dengan demikian, Gubernur Jenderal Daendels ditugaskan mempertahankan wilayah koloni (Jawa) dari kemungkinan serangan Inggris yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Setibanya di Indonesia (Jawa), Daendels dengan kekuatan diktatornya langsung memulai pembangunan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertahanan Jawa.

Sebagai instruksi yang dikeluarkan Raja Louis pada tanggal 9 Februari 1807, pasal 12 dari 37 pasal berhubungan dengan urusan militer dan pasal 14

menyatakan bahwa reorganisasi tentara adalah kewajibannya yang pertama.⁵¹ Dengan demikian, setibanya di Jawa Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal itu lekas melaksanakan tujuan utama misinya. Ia dengan segera mempersiapkan kekuatan militer sebagai basis pertahanan dari invasi Inggris.

Pertahanan Jawa sendiri tidak memadai. Tentara di Jawa berjumlah sangat sedikit, tidak lebih dari 3.000 serdadu, dan hanya 1.000 diantaranya orang Eropa.⁵² Daendels tidak membawa pasukan baru bersamanya, tetapi dia segera meningkatkan jumlah pasukan. Sebagian besar pasukan terdiri dari orang-orang Indonesia, yang menjadi tentara kolonial Belanda dari 4.000 menjadi 18.000 orang.⁵³ Dengan pengalaman militernya, ia berupaya menambah dan memperbaiki para serdadu, resimen baru dari serdadu pribumi dihimpun dan dilatih. Perwira sangat dibutuhkan, Daendels mempromosikan sejumlah juru tulis dan warga berdarah campuran ke pangkat perwira. Karena tidak cukup petembak artileri, senjata atau perlengkapan, Daendels dengan sangat giat berusaha menyediakan segala sesuatu, membangun pabrik mesiu dan senapan, benteng dan meriam pantai.⁵⁴ Bersamaan dengan itu, barak-barak dan rumah sakit dibangun, sebuah bengkel pabrik senjata di Semarang dan Surabaya dibangun. Daendels juga membangun armada kapal di Teluk Meruwah dan Teluk Merak di Selat Sunda, dan di Surabaya diperkuat lebih lanjut dengan benteng Fort Lodewijk,⁵⁵ untuk

⁵¹ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 280.

⁵² *Ibid.*, hlm. 272.

⁵³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 171.

⁵⁴ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 283.

⁵⁵ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 446.

memblokir akses ke wilayah Surabaya. Sedangkan Batavia diperkokoh dengan membangun benteng-benteng baru di Weltevreden dan Meester-Cornelis.

Komplek militer disiapkan Daendels sedemikian rupa untuk menampung personil dari kawasan Weltevreden dan Meester-Cornelis. Sebagian besar wilayah bekas kompleks militer tersebut kini digunakan untuk TNI dan Kepolisian, seperti terlihat di daerah Kwitang, sekitar Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) Gatot Subroto, Tangsi militer ditempati oleh Korps Marinir TNI AL.⁵⁶ Kini kekuatan militer di Jawa tidak bisa diabaikan lagi, Daendels telah mengumpulkan pasukan, senjata, amunisi dan membuat benteng-benteng militer yang kuat di Jawa.

Dengan reorganisasi menyeluruh pertahanan militer, Daendels optimis membendung Invasi Inggris. Disamping itu, pasukan Daendels akan diperkuat dengan kehadiran Batalion XII Prancis dari Kepulauan Mauritius di sebelah timur Madagaskar. Dari kepulauan Mauritius yang terdiri dari *Ile de France* dan *Ile de Bourbon*, Angkatan Laut Prancis mencatat kemenangan pertempuran laut melawan Angkatan Laut Inggris dalam pertempuran laut di Samudra Hindia.⁵⁷

2. Mega Proyek Jalan Raya Pos (Kerja Paksa)

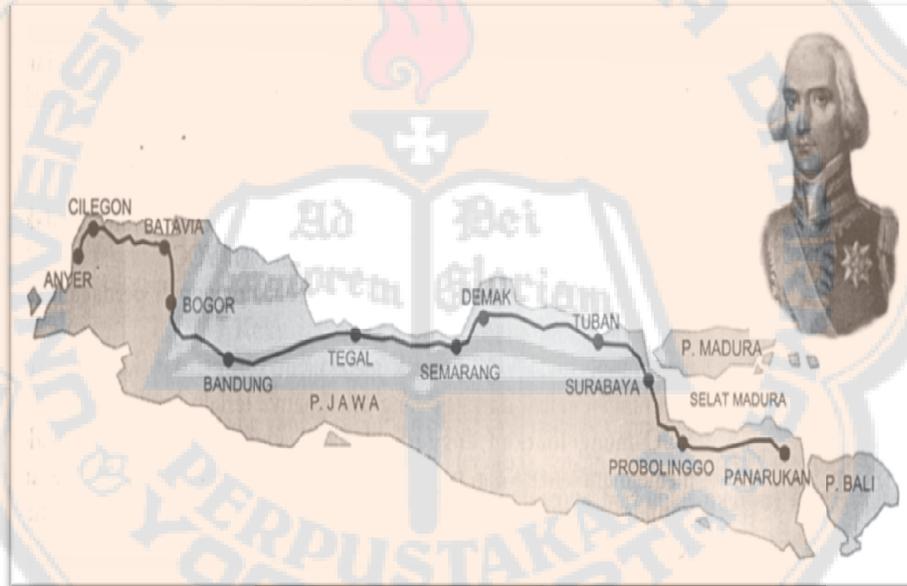
Kita tidak mungkin bisa membayangkan atau bahkan menggambarkan bagaimana wujud transportasi darat di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa, dan memang kita tidak akan membahas hal itu. Tetapi sebagai gambaran betapa sederhananya sarana transportasi darat ini, diawal kedatangannya Daendels mencoba menyusuri pelosok Jawa dan melihat pantai dimana ancaman pasukan Inggris diperkirakan sewaktu-waktu akan mendarat. Ia menyadari beratnya medan

⁵⁶ Jean Rocher & Iwan santosa, *op. cit.*, hlm. 19.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

yang dilaluinya, bagian selatan pulau Jawa sangat terjal dan berombak ganas Samudra Hindia, oleh karena itu kemungkinan kecil tidak mudah didarati. Tetapi di pantai utara Jawa, keadaan berbeda, dimana di sekitar pesisir banyak tempat yang kemungkinan cocok untuk sewaktu-waktu dilakukannya pendaratan oleh pasukan Inggris. Dari itu, sangat membantu jika di sekitar pantai utara (Pantura) ini dibangun sarana penghubung yang dapat ditempuh dalam waktu singkat.

Gambar 3.1 :
Peta *Jalan Raya Pos* yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels⁵⁸



Daendels sebagai penguasa (Gubernur Jenderal) sadar betul akan pentingnya jalan darat yang memadai. Daendels lantas membuat kebijakan untuk membangun jalan yang mudah dilalui, yang menghubungkan wilayah ujung Timur dan Utara pulau Jawa. Jalan monumental yang membentang \pm 1000 km berawal dari Anyer sampai Panarukan, dari ujung pulau Jawa bagian Barat

⁵⁸ <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011/peta-jalan-raja-pos>, diakses tanggal 10 Juni 1014.

melalui daerah rendah utara Banten sampai Batavia terus ke Buintenzorg (Bogor) dan melalui daerah pegunungan Priangan tiba di Cirebon. Selanjutnya lewat dataran rendah dan dataran tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Surabaya. Dari Surabaya jalan ini diteruskan ke ujung timur Jawa Timur berakhir di Panarukan. Jalan monumental ini dikenal dengan Jalan Raya Pos (*Groote Post Weg* atau *Grand-route de la Poste*) yang menghubungkan pantai Utara dan pantai Timur Jawa, dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari Batavia-Surabaya.⁵⁹ Pembangunan jalan Raya Pos ini juga dipaparkan sebagai berikut:

Kegiatan lain yang bersifat mega-proyek, yang tingkat tinggi kekejamannya hingga kini masih diingat oleh banyak orang Indonesia, adalah pembuatan jalan raya sepanjang kurang lebih 1000 kilometer yang menjelujur dari ujung barat Jawa Barat hingga ujung timur Jawa Timur. Jalan ini terus bersambung, bermula dari Anyer melalui Serang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Juwana, Rembang, Tuban, Sedayu, Surabaya, Pasuruhan, dan berakhir di Panarukan. Kecuali bagian sepanjang Jakarta-Cirebon, *Jalan Daendels* atau yang sering disebut pula *Jalan Pos* ini menjelujur seperti benang di sepanjang Pantai Utara Jawa. Selain yang melintasi Pantai Utara Jawa, melalui pengerahan tenaga kerja rakyat Daendels juga membangun jalan yang melintas Pantai Selatan Jawa.⁶⁰

Pelaksanaan pembangunan jalan ini menyebabkan banyak kematian dari para pekerja paksa dan tanpa diupah.⁶¹ Jalan raya pos ini berperan penting dalam mendukung lancarnya gerakan militer, sehingga pertahanan dan keamanan di pulau Jawa lebih diperkokoh. Disamping itu, dengan adanya jalan ini dapat melancarkan pengangkutan barang-barang ke kota-kota pelabuhan terdekat dan sebaliknya pada masa itu. Ini berarti bahwa jalan tersebut tidak hanya berperan

⁵⁹ Jean Rocher & Iwan santosa, *op. cit.*, hlm. 18.

⁶⁰ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm.155.

⁶¹ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hml. 446.

dalam bidang transportasi, tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintah dan mobilisasi sosial.

Pembangunan Jalan raya Pos adalah keberhasilan yang luar biasa. Daendels memperkuat rangkaian pos-pos jaga yang terletak di sepanjang jalan ini. Kota-kota militer tercipta di Meester Cornelis, Buitenzorg (sekarang Bogor), Semarang, Surabaya dan lain-lain. Daendels lantas boleh merasa puas dengan proyek pretisiu ini, ditambah lagi reorganisasi militer yang dilakukannya. Tetapi, musuhnya tetap akan menyerang.

3. Tanam Paksa

Guna menjamin kepastian atas hak milik tanah, kebebasan dan kekuasaan atas tanah, Daendels memberikan hak agar petani memiliki tanah. Dalam konsepnya, ia menghendaki terwujudnya kebebasan menanam dan kebebasan mempergunakan hasil tanaman petani, mengubah penyerahan paksa menjadi penjualan bebas, begitu pula dengan penanaman wajib kopi. Kewajiban menanam kopi yang menurut surat tugasnya diselidiki dan kemungkinan dihapuskan, karena dipandang sebagai beban bagi rakyat, oleh Daendels makin diperluas. Di Priangan, sistem penanaman kopi gaya lama (*Priangan Stelsel*) diperluas dengan menaikkan kuota produksi dan menurunkan harga pembelian.⁶² Untuk besarnya ekspor kopi pada masa itu dapat dilihat dalam Tabel: 3.1.

⁶² Parakitri T.Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2006, hlm 95

Tabel 3.1 : Produksi dari daerah-daerah bawahan Batavia, jadi dari daerah Batavia dengan sekitarnya, dan Pariangan dalam tahun 1796-1810 dinyatakan dalam pikol (satu pikol ‘pikul’) adalah $\pm 62,5$ kg.⁶³

Tahun	Produksi			
	Kopi	Nila	Benang	Lada
1796	57.769	25	90	23
1797	81.986	27	97	20
1798	65.178	17	93	38
1799	44.062	29	96	16
1800	62.764	27	97	14
1807	104.000	-	-	-
1808	112.028	-	-	-
1809	100.029	-	-	-
1810	99.420	-	-	-

Dengan diperluasnya penanaman wajib kopi, maka jumlah pohon kopi pun bertambah dari semula berjumlah 27 juta batang, kemudian bertambah menjadi 72 juta batang.⁶⁴ Sejalan dengan perluasan tanaman kopi, Daendels juga menetapkan bahwa para bupati berkewajiban memperluas dan mengawasi penanaman kopi. Mengenai peningkatan tajam tanaman wajib kopi ini juga dipaparkan sebagai berikut:

.....Di bawah pemerintahan dari Marsekal Daendels terjadi peningkatan tajam wajib tanam kopi. Jumlah pohon di Jawa bertambah lebih dari 45 juta batang, dari 26.956.467 pada tahun 1808 tiga tahun kemudian mencapai jumlah total 72.669.860. Pretensi membuat catatan yang sangat ketat – menghitung sampai pohon terakhir – akan mewarnai perkebunan kolonial pada paruh pertama abad ke-19. Selain kabupaten Priangan muncul sejumlah daerah produksi kopi baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai dampak perluasan wilayah yang ditanami pohon ini, pada tahun 1808 Daendels mengangkat inspektur-

⁶³ Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 110.

⁶⁴ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 447.

jenderal urusan kopi. Pemegang jabatan ini, C. Von Winckelmann.....⁶⁵

Tabel 3.2 : Penanaman pohon kopi tahun 1806-1811 dan jumlah petani tahun 1810/1811 di Kabupaten Pariangan⁶⁶

Kabupaten	Tahun/Jumlah					Keluarga
	1806-7	1807-8	1808-9	1809-10	1810-11	
Bogor	336.370	274.100	262.505	447.000	463.000	2.283
Cianjur	1.444.106	821.603	1.401.644	918.715	1.169.570	5.813
Bandung	1.357.525	811.540	665.500	1.620.200	1.042.730	4.060
Par. Muncang	560.700	479.860	1.040.570	1.186.800	678.621	3.721
Sumedang	362.760	189.300	538.550	918.130	702.500	2.998
Krawang	359.398	145.915	151.958	160.490	119.100	636
Limbang	96.000	110.000	314.400	346.210	1.918
Sukapura	304.800	110.000	1.255.200	686.300	36.800	2.656
Galuh	67.400	54.700	1.370.000	1.351.500	522.100	1.705
Total	4.889.059	2.997.018	7.000.327	7.635.345	4.735.421	25.340

4. Tindakan-tindakan Penyelewengan Daendels

Sepertinya melenceng dari misi dan cita revolusi Prancis, Daendels, meski terlihat sosok yang berintegritas dan keras, tidak mampu menolak iming-iming kekayaan yang menggoda setiap orang yang menjabat di Jawa. Dia menjual tanah pemerintah yang telah dialokasikan dengan status meragukan. Dia juga memperdagangkan barang-barang kekayaan kolonial seperti halnya yang dilakukan seorang pedagang biasa.⁶⁷ Semua langkah Daendels itu memerlukan biaya, padahal produksi dari Nusantara sudah menumpuk tak bisa dijual karena blokade Inggris.

⁶⁵ Jan Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 109.

⁶⁶ Jan Breman, *op. cit.*, hlm. 110.

⁶⁷ Jean Rocher dan Iwan santosam, *op. cit.*, hlm. 20.

Daendels berupaya mencari jalan lain. Ia menghidupkan kembali kebiasaan VOC, yaitu menjual tanah kepada partikelir (*particuliere landrijen*) dan memberikan kepada pembelinya hak pertuanan (*heerlijke rechten*). Pembayaranannya boleh dicicil, dan hasil tanah itu dijadikan agunan. Seperti yang terjadi di kawasan Jawa Timur misalnya, Daendels menjual tanah kepada pengusaha China, dengan nilai penjualan mencapai 3,5 juta gulden.⁶⁸ Tanah-tanah milik pemerintah ini dijual Daendels sebagai langkah terakhir, satu langkah yang bermanfaat untuk mencapai tujuan memodernkan struktur ekonomi masyarakat Jawa. Hasil pertama dan paling diinginkan dari transaksi itu adalah memasukkan uang ke dalam perbendaharaan. Yang ke dua, menurut Daendels adalah mempromosikan pertanian dan industri. Daendels dengan menjual tanah milik pemerintah itu, mengklaim telah membuka Jawa bagi perusahaan swasta.⁶⁹ Mengenai penjualan tanah (tanah partikelir) juga disebutkan sebagai berikut:

Pada awal abad ke-19, sebagian besar petani di pinggiran Kota Surabaya berada dalam penguasaan para tuan tanah partikelir. Tuan tanah partikelir adalah para pengusaha yang diberi kesempatan untuk membeli tanah-tanah yang dijual oleh pemerintah kolonial dalam rangka mengumpulkan uang. Mereka dengan leluasa membeli tanah-tanah pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Penjualan tanah partikelir banyak dilakukan oleh Daendels dan Raffles antara tahun 1808-1813.⁷⁰

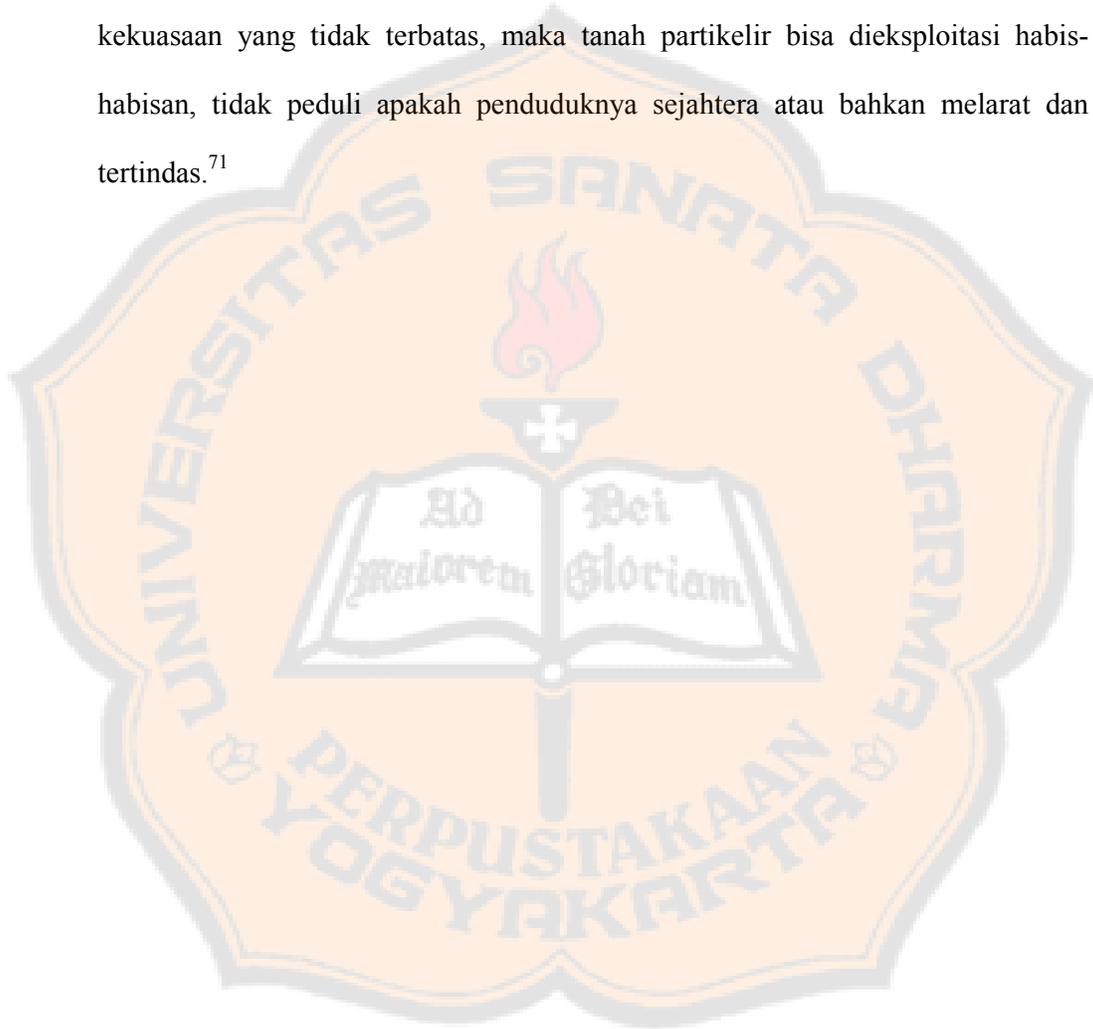
Penjualan tanah oleh Daendels kepada pihak swasta membawa konsekuensi yang luar biasa berat terhadap penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Selain penduduk pribumi kehilangan haknya atas tanah tempat tinggal, mereka juga kehilangan tanah yang mereka garap sebagai lahan pertanian. Penderitaan para

⁶⁸ Parakitri.T.Simbolon, *op. cit.*, hlm. 95.

⁶⁹ Benard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 283.

⁷⁰ http://lms.aau.ac.id/library/ebook/J_04712/files/res/downloads/download_0040.pdf

penduduk yang tinggal di wilayah tanah partikelir amat berat, karena para tuan tanah memiliki kekuasaan (sifatnya memaksa), memungut penghasilan dan pelayanan jasa dari penduduk yang tinggal di wilayah mereka. Dengan adanya kekuasaan yang tidak terbatas, maka tanah partikelir bisa dieksploitasi habis-habisan, tidak peduli apakah penduduknya sejahtera atau bahkan melarat dan tertindas.⁷¹



⁷¹ *Idem.*

BAB IV

DAMPAK EKSPLOITASI PADA MASA GUBERNUR JENDERAL

HERMAN WILLEM DAENDELS

Berlangsungnya pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Indonesia (Jawa) tahun 1808-1811, meninggalkan dampak yang sangat besar. Bukan hanya mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan fisik, tetapi juga psikis, namun selain meninggalkan dampak negatif itu, dari sana terdapat hal-hal positif yang sedikit banyaknya bermanfaat bagi bangsa ini. Pada bab IV ini dibahas bagaimana dampak pemerintah kolonial rezim Daendels di Jawa, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya, baik berupa dampak negatif maupun positif, bagi Indonesia dan Belanda.

A. Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial-budaya bagi Indonesia

1. Dampak Negatif

a. Dalam bidang politik

Sejak awal pemerintahannya di Indonesia (Jawa), Daendels berusaha melakukan perubahan politik dengan merombak secara radikal sistem pemerintahan feodal Jawa dan meletakkan sistem birokrasi Barat.⁶⁷ Perubahan-perubahan tersebut dilaksanakan dengan perampasan hak otonom atas penguasa feodal Jawa dan berusaha menguasai seluruh Jawa.

Daendels antara lain merombak Provinsi Pantai Timur Jawa, dan merubah atau membaginya menjadi 5 daerah prefektorat (devisi atau provinsi) dan 38

⁶⁷ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op .cit.*, hlm. 42.

regenschap (kabupaten),⁶⁸ kemudian menempatkan para bupati sebagai pejabat pemerintah Belanda, diberi gaji dan ditentukan korelasinya berdasarkan kepangkatan militer.⁶⁹ Sesuai dengan prinsip yang diyakininya, Daendels berusaha menciptakan pemerintahan yang sentralistis di bawah kekuasaan kolonial, sebagai penopang untuk mengintensifkan eksploitasi sumber daya. Selain itu, pada masa pemerintahannya, Daendels juga menghapuskan kesultanan Banten dan kemudian membuang sultan ke Ambon.⁷⁰

Kondisi seperti ini berdampak negatif bagi penguasa feodal pribumi. Tindakan sewenang-wenang Daendels sangat merugikan para penguasa feodal dan dipandang sebagai bentuk penghinaan. Selain itu, perubahan birokrasi pemerintahan yang dilakukan Daendels secara langsung menempatkan penguasa feodal Jawa berada di bawah pengawasan Daendels (pemerintah pusat yang berada di Batavia). Para penguasa feodal Jawa yang semula semi-otonom dan memerintah rakyat menurut selernya sendiri kini terbatas, dan dinyatakan sebagai pegawai pemerintah Belanda, diberi pangkat militer dan digaji.

Pengaruh pemerintahan Daendels memang semakin kuat, ia melakukan intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan kerajaan di bawah pengawasan dan persetujuan pemerintah kolonial. Dalam bidang politik penguasa-penguasa pribumi makin tergantung kepada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam

⁶⁸ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 446.

⁶⁹ P. J. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 56-56.

⁷⁰ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 448-449.

menentukan kebijakan pemerintahan istana sangat terbatas jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi makin berkurang, bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Mengenai kuatnya pengaruh rezim pemerintahan Daendels dipaparkan demikian:

....Daendels membawa ke Jawa suatu perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode kediktatoran....Dia memiliki perasaan tidak suka, yang muncul dari naluri-naluri anti feodalnya, terhadap para penguasa Jawa. Bagi Daendels, mereka bukan penguasa atau pemimpin atas masyarakat, melainkan pegawai administrasi Eropa. Dia pun mengurangi wewenang dan penghasilan penguasa Jawa....Para residen di istana kini dinamakan 'Minister', bukan 'Residen'. Mereka dipandang sebagai wakil-wakil lokal dari kekuasaan pemerintahan Eropa, yang di Batavia oleh gubernur-jenderal. Dalam semua urusan protokol, mereka mulai sederajat dengan raja-raja Jawa. Ini merupakan suatu pelanggaran langsung terhadap hubungan yang sudah terjalin sejak tahun 1750-an....Daendels juga mengeluarkan ultimatum kepada Hamengkubuwana II, yang harus menyetujui perubahan terhadap upacara istana yang berkaitan dengan kedudukan 'Minister' Eropa....Kemudian pada bulan Januari 1811, Daendels memaksakan perjanjian-perjanjian baru, yang melibatkan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan Belanda, kepada Surakarta maupun Yogyakarta.⁷¹

Tindakan kekerasan politik atau sebaliknya politik kekerasan yang terjadi dalam skala kolonial rezim Daendels, menjadi kondisi yang paling dominan. Tampilnya kekuatan penguasa rezim Daendels menggantikan para pendahulunya, rezim VOC atau Dirk van Hegendrop dipanggung kolonial Indonesia (Jawa)

⁷¹ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 243-246.

ditandai dengan proses berlangsungnya tindakan yang otoriter, berupa penindasan dengan kerja rodi yang paling kurang ribuan jiwa penduduk pribumi dipertaruhkan dan tanaman wajib serta pembatasan kekuasaan dari para penguasa feodal Jawa.

b. Dalam bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, ketetapan-ketetapan dan praktik-praktik kolonial berdampak pada makin merosotnya penghasilan penguasa pribumi. Keadaan ini menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan mereka. Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor seperti tanaman wajib kopi. Selain itu rakyat masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial.⁷² Perekonomian rakyat tidak berkembang, kemakmuran mereka melorot jatuh dan kemiskinan semakin menjadi. Para petani tetap tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja secara mandiri. Praktik tanaman wajib kopi yang diperluas Daendels dan kerja paksa yang diberlakukan hanya dinikmati dan dipaksakan guna kepentingan kolonial.

Politik pemerintahan Daendels menempatkan Jawa sebagai saka guru bagi kehidupan dan kepentingan negeri induk (Belanda). Sampai dengan akhir pemerintahannya, konsentrasi kolonial memang terletak di Jawa. Akibatnya, Jawa harus menanggung beban perbendaharaan dan pembangunan untuk kepentingan kolonial. Termasuk kepentingan mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris harus dibebankan kepada penduduk Jawa.

⁷² Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 292.

c. Dalam bidang sosial-budaya

Fenomena yang menarik jika dicermati dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, adalah bahwa kian tahun kian meluasnya pengaruh kolonial terhadap kehidupan rakyat bumi putra. Dengan demikian tidak terkecuali pada masa rezim pemerintahan Daendels di Indonesia (Jawa) pada tahun 1808-1811. Berlangsungnya kolonialisme pada masa Daendels, berlangsung pula suatu proses pemaksaan dan penindasan terhadap tatanan sosial-budaya pada masyarakat pribumi. Proses akulturasi antara tatanan sosial budaya pribumi (Jawa) dan Barat tidak berimbang, melainkan terlalu didominasi kebudayaan Barat. Tatanan sosial-budaya asli pribumi cenderung dipandang rendah, dipandang sebagai yang primitif, dan karya-karya budaya asli pribumi (Jawa) merupakan budaya yang dipandang tidak bernilai.⁷³

Meluasnya pengaruh pemerintah kolonial rezim Daendels mengakibatkan makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa feodal, dan hal demikian semakin memberatkan rakyat jelata. Turunnya kedudukan penguasa pribumi dipandang sebagai pelecehan derajat dan kehormatan sebagai penguasa. Di bawah pengawasan pemerintah Belanda, penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk mengurus sumber daya Indonesia, seperti memungut pajak, mengurus tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda.

Sejak rezim pemerintahan kolonial Daendels, penduduk pribumi diperlakukan sebagai faktor dan sistem produksi terutama untuk dieksploitasi

⁷³ Agus Sachari, *Budaya Visual Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 50.

tenaga kasarnya di lapangan, misalnya dalam proses penanaman, pemeliharaan, peneuaian, pengerjaan jalan (*Jalan Raya Pos*). Dengan demikian, pada aspek sosial peranan tenaga pribumi ditempatkan pada lapisan bawah, sebagai buruh atau pekerja kasar yang di atasnya terdapat orang Eropa sebagai pengambil prakarsa.

Makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional mengakibatkan beberapa tradisi di lingkungan istana para penguasa feodal Jawa (raja-raja Jawa) mulai luntur. Tradisi-tradisi dalam kerajaan mulai terbatas,⁷⁴ dan dengan demikian jelas bahwa pengaruh kehidupan Barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Sistem pemerintahan yang terbangun pada rezim Daendels otomatis merugikan bagi rakyat dan penguasa feodal, karena sistem tersebut praktis menempatkan mereka di bawah penguasaan Kolonial (Daendels), yang membawa segala macam hak-hak istimewanya.

2. Dampak Positif

a. Dalam bidang politik

Reformasi yang dilakukan Daendels merupakan satu langkah awal memperkenalkan kepada penduduk pribumi dengan sistem birokrasi pemerintahan modern, dan semua reformasi yang dilakukannya sangat penting. Misalnya, dengan diprakarsainya pemerintahan yang sentralistis menurut sistem birokrasi modern, maka administrasi pemerintahan menjadi lebih rapi. Selain itu, dengan pembatasan kekuasaan dan hak bupati yang dilakukan Daendels, maka secara formal rakyat pribumi terlindungi dari kesewenang-wenangan bupati. Pada aspek

⁷⁴ Agus Sachari, *op. cit.*, hlm. 50.

pembenahan semacam ini kekuatan humaniter ide-ide liberal terlihat bisa diaktualkan.⁷⁵

Daendels memang mencurahkan perhatiannya dalam pembenahan birokrasi pemerintahan di Jawa. Selain diperkenalkan dengan sistem baru mengenai pengaturan dan pembagian daerah administrasi pemerintahan, Daendels juga mendirikan kantor-kantor atau lembaga pengadilan khusus untuk pribumi dan orang asing (bukan pribumi), misalnya Eropa, Cina, Arab dan orang Asia lainnya. Mengenai pembenahan organisasi dan praktek peradilan pada rezim Daendels, dinyatakan demikian:

Bahwa organisasi dan praktek peradilan di Batavia telah lama perlu dirombak.... Khusus sistem pengadilannya sendiri bagi pribumi menurut adatnya (misalnya pelaksanaan adat) tak pernah ada di bawah kompeni. Situasi yang sangat memalukan ini harus diakhiri Daendels dengan mendirikan kantor-kantor di tiap regenschap dan landdrostamt dimana pengadilan harus dilonggarkan menurut hukum adat (adatrecht). Ini terpisah dari Dewan Pengadilan yang didirikan di Batavia, Semarang dan Surabaya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menyangkut orang-orang Asia, misalnya orang-orang Eropa, Cina, Arab dan yang manapun yang bukan pribumi Jawa. Dalam pengadilan ini adalah sesuai dengan Hukum Hindia Belanda. Pada Pengadilan Pribumi yang lebih rendah, pejabat-pejabat dan pendeta-pendeta diikutsertakan hadir. Pengadilan-pengadilan perfecture dipimpin oleh landdrost dengan seorang pejabat Belanda sebagai sekretaris dan sejumlah pembantu pribumi. Sistem naik banding juga dari pengadilan yang lebih rendah kepada Dewan Pengadilan telah dilembagakan....⁷⁶

Dengan demikian Daendels mengerjakan sistem baru dalam organisasi dan praktek peradilan di Jawa, yang pada masa sebelumnya tidak pernah dilaksanakan. Daendels memisahkan lembaga pengadilan khusus bagi penduduk pribumi (Jawa) dengan orang-orang asing. Pada masanya pulalah untuk pertama

⁷⁵ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 149.

⁷⁶ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 447.

kalinya dilembagakan sistem naik banding dari pengadilan yang lebih rendah kepada Dewan Pengadilan. Kemudian,

Bagi orang Jawa, terbangunnya lembaga pengadilan menurut adat setempat memberikan peluang bagi berkurangnya kesenjangan hukum atau pun kesewenang-wenangan hukum. Hanya saja perlu dianggotakan bahwa Daendels menjabat Gubernur Jenderal terlalu pendek waktunya untuk berbuat lebih banyak dari pada sekedar meletakkan dasar-dasarnya (secara konseptual).⁷⁷

b. Dalam bidang ekonomi

Sejak berlangsungnya rezim pemerintahan Daendels (1808-1811) di Indonesia (Jawa), secara tidak langsung penduduk pribumi Jawa khususnya di daerah pantai Timur Jawa sedikit mendapat keringanan dengan dihapuskan penyerahan wajib benang-benang, kapas dan nila.⁷⁸ Dengan demikian beban tanggungan rakyat jelata terhadap intensitas kerja paksa dan penyerahan wajib sedikit berkurang.

Selain menghapuskan tanaman dan penyerahan wajib tersebut (kapas, benang dan nila) di pantai Timur Jawa. Dalam pembaharuan sistem perekonomian, Daendels juga mengenalkan sistem gaji, bahkan menaikkan gaji pejabat-pejabat pemerintah sebagai metode memberantas korupsi.⁷⁹ Kasus korupsi ini memang merupakan ironi sejarah. Korupsi yang begitu merajalela pada masa VOC dan digadag-gadag sebagai salah satu penyebab dibubarkannya lembaga dagang semi negara (VOC) pada tahun 1800, kembali marak di era ini.

Pada masa pemerintahan Daendels pula, secara tidak langsung rakyat (petani) pribumi Jawa mengenal tanaman komersil atau tanaman ekspor yang laku

⁷⁷ Anton Haryono, *op. cit.*, hlm. 151.

⁷⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 139.

⁷⁹ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 448.

dalam perdagangan. Penduduk pribumi (petani) juga mengetahui cara atau teknik pembibitan dan penanamannya. Disamping itu, pembangunan atau pelebaran Jalan Raya Pos (*de grote postweg*) yang diprakarsai Daendels telah mengubah secara besar-besaran kondisi kehidupan perekonomian di Jawa. Bahkan, pembangunan jalan raya yang membentang dari Anyer sampai Panarukan ini, manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang.

c. Dalam bidang sosial-budaya

Kedatangan bangsa Barat, khususnya Belanda pada masa Gubernur Jenderal Daendels ke Indonesia (Jawa) pada tanggal 1 Januari 1808, otomatis membawa tatanan sosial-budaya baru. Salah satu kecenderungan tatanan sosial-budaya baru yang masuk ke Indonesia (Jawa) adalah kebijakan Daendels dengan mengeluarkan Dekrit yang mengintruksikan kebijakan terhadap tradisi Jawa dan pendidikan di Jawa. Sebagaimana yang dipaparkan demkian;

Gubernur Jenderal pertama yang menaruh minat terhadap tradisi Jawa ialah Herman Daendels. Pada 1808 dia mengeluarkan ordinasi yang menetapkan tugas bupati-bupati Jawa di provinsi-provinsi pantai, yang berisi: *Para bupati harus memastikan bahwa pengajaran diberikan kepada anak-anak dan kepada mereka diajarkan adat istiadat, hukum dan praktik keagamaan orang Jawa. Untuk itu sekolah-sekolah akan didirikan di komunitas-komunitas utama di setiap kabupaten.* Dekrit ini adalah salah satu ordinasi Daendels yang bertujuan baik.....Daendels adalah murid sejati Revolusi Prancis (yang dia saksikan sebagai saksi mata yang antusias ketika hidup dalam pelarian di Prancis) dan keprihatinannya terhadap pendidikan untuk semua orang sungguh nyata.....Sejarawan pendidikan Hindia Belanda mengatakan bahwa Daendels memerintahkan mantan sultan Cirebon mendirikan tiga sekolah tari untuk anak perempuan.....Gubernur jenderal itu juga mendorong penduduk “Eropa”, khususnya di Batavia,

mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tempat mereka akan bicara bahasa Belanda.⁸⁰

Pada masa pemerintahannya, program pendidikan dan pengajaran bagi kaum pribumi belum merupakan prioritas utama, dan bahkan hanya terbatas bagi kalangan tertentu, pejabat pribumi dan golongan Eropa. Namun dalam proses modernisasi suatu masyarakat, pengajaran dan pendidikan merupakan indikator penting. Selain mengeluarkan Dekrit tersebut, sebagaimana latar belakang Daendels yang merupakan seorang militer, sesuai dengan keahliannya dan tugas utamanya mempersiapkan pertahannya Jawa dari serangan Inggris. Daendels memberikan perhatian lebih besar lagi pada pelatihan dan penguatan tentara di Jawa. Sebagai bentuk besarnya perhatian Daendels terhadap pengembangan militer, lapangan mardeka yang sangat luas (eks Koningsplein) sepanjang 1 km dan lebar 850 meter, pada zaman Daendels merupakan lahan untuk latihan militer.⁸¹ Mengenai program pendidikan dan pengajaran pada masa Daendels juga disebutkan demikian:

....Semasa pemerintahan Hindia-Belanda, program pembelajaran bagi kaum pribumi belum merupakan prioritas utama. Pembelajaran itu secara terbatas telah diselenggarakan pada tahun 1809, pada masa pemerintahan Daendels, memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan di sekolah bidan agar nantinya dapat membantu pemeliharaan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan itu, didirikan sekolah kesenian di Cirebon yang bertujuan untuk memajukan tarian rakyat setempat. Pengajaran yang diselenggarakan baru terbatas pada menari, menyanyi, membanca, dan menulis...⁸²

⁸⁰ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 310-311.

⁸¹ Bernard Dorleans, *Orang Indonesia & Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2006, hlm. 316.

⁸² Agus Sachari, *op. cit.*, hlm. 54.

Sejalan dengan itu, maka lembaga pendidikan dan pengajaran, pelatihan militer, serta pembangunan pabrik-pabrik senjata memungkinkan rakyat pribumi mengalami perkembangan tatanan sosial-budaya ke arah proses modernisasi. Tumbuhnya pemikiran modern pada rakyat pribumi, secara bertahap berkembang ke arah terbentuknya masyarakat modern yang lebih besar. Artian modern di sini adalah perkembangan pola pikir, bahasa, teknik-teknik baru, dan pada hakekatnya merupakan landasan terbentuknya tatanan sosial-budaya modern di Indonesia.

B. Dampak Politik, Ekonomi dan Sosial-budaya Bagi Belanda

1. Dampak Negatif

a. Dalam bidang politik

Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia (Jawa), Gubernur Jenderal Daendels dikenal dengan kediktatorannya, memiliki sifat gila hormat, gila kekuasaan dan keras kemauannya. Karena sifat-sifat tersebut ia dijuluki Tuan Besar Bledag (Tuan Besar Guntur).⁸³ Perlakuan Daendels yang dipandang buruk, melecehkan raja-raja Jawa dan menganggap kedudukan para penguasa feodal (raja-raja) Jawa sebagai bawahannya, serta dengan semauanya memerintah para raja-raja Jawa, berdampak terhadap ketidak setiaan mereka kepada pemerintah Belanda (Daendels).

Tindakan politik Daendels yang begitu otoriter dan represif selama memerintah sebagai Gubernur Jenderal, menyulut api pemberontakan penduduk pribumi atau penguasa feodal Jawa terhadapnya. Sebagaimana yang terjadi di Banten, permintaan Daendels kepada sultan untuk menyediakan tenaga kerja

⁸³ A.K Wiharyanto, *op. cit.*, hlm. 107.

ditentang oleh sultan Banten. Sikap sultan Banten tersebut menunjukkan bentuk protes dan sikap pemungkiran (tidak tunduk) sebagai bawahan kepada pemerintah Belanda.⁸⁴

Perlakuan diktator Daendels, yang tingkat menindasnya begitu tinggi tidak hanya menyulut api perlawanan dari sultan Banten saja. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap menindasnya tersebut, Daendels juga mendapat reaksi dan kecaman dari kerajaan Yogyakarta, dan kemudian menimbulkan konflik (perlawanan) terhadap Daendels. Pada tahun 1810, Raden Rangga, kepala pemerintahan Sultan untuk wilayah-wilayah luar (*mancanegara*), melancarkan sebuah perlawanan terhadap pemerintahan Daendels.⁸⁵

Sikap pemerintahan Daendels yang diktator lantas dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Banyak keluhan terhadap sikap diktator Daendels yang diajukan oleh pejabat-pejabat tinggi Belanda kepada Raja Louis. Hal ini berujung kepada penarikan dirinya (Daendels) kembali ke negeri Belanda. Louis Napoleon yang merasa bertanggung jawab atas baik-buruknya pemerintahan Daendels di Jawa, merasa tersinggung kehormatannya. Karena itu pada tahun 1811, Daendels dipanggil ke Eropa.⁸⁶

b. Dalam bidang ekonomi

Dalam melaksanakan pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, Daendels mengalami masa-masa sulit. Kondisi demikian akibat perang antara Inggris dan Prancis, armada pasukan Inggris yang lebih kuat di laut menjadi

⁸⁴ D.G.E. Hall, *op. cit.*, hlm. 448-449.

⁸⁵ M.C. Riclefs, *op. cit.*, hlm. 172.

⁸⁶ A.K Wiharyanto, *op. cit.*, hlm. 107.

musuh utama bagi Prancis. Akibatnya Kerajaan Belanda yang merupakan negara vasal Prancis terancam kehilangan wilayah jajahannya di Indonesia (Jawa). Ancaman itu semakin serius lagi ketika Inggris berhasil menguasai Tanjung Harapan dan meningkatkan blokade laut atas Batavia.⁸⁷ Sekarang Jawa berada dalam posisi terancam dan dengan demikian hubungan Jawa dengan Eropa terputus. Mengenai blokade yang dilakukan Inggris disebutkan demikian:

Koloni-koloni Belanda tidak punya pertahanan memadai melawan kemungkinan serangan Britania, tapi hanya daerah milik Kompeni di daratan India yang mengalami kerusakan karena aksi musuh. Yang lebih parah ialah bahwa Britania berhasil memblokade dengan sangat efektif pelabuhan-pelabuhan Belanda sehingga semua hubungan langsung antara Belanda dan Hindia terputus. Produk-produk tropis dalam jumlah besar tertimbun di gugang-gudang Batavia. walaupun semua produk bernilai jutaan, pemerintah Batavia sangat kekurangan uang. Suplai koin perak dan tembaga yang biasa datang dari Belanda tidak tiba, dan Batavia tidak dibolehkan menjual produknya di pasar terbuka untuk memperoleh uang kontan yang dibutuhkannya.⁸⁸

Dengan demikian hampir mustahil Daendels bisa mendapatkan bantuan ekonomi guna membiayai program-programnya di Jawa, sedangkan program-program tersebut (membangun pertahanan militer, benteng, pabrik senjata dan jalan Raya Pos) membutuhkan biaya yang besar. Daendels berusaha mengatasi kondisi keuangan tersebut dengan memperluas tanaman wajib perkebunan kopi, yang seharusnya dihapuskan dalam instruksi tugasnya. Namun hasil dari perkebunan kopi tersebut tidak bisa di ekspor atau diperdagangkan ke Eropa akibat blokade yang dilakukan Inggris. Mengenai penumpukan kopi disebutkan demikian:

⁸⁷ M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 247.

⁸⁸ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 261.

Kopi bertumpuk di gudang-gudang Batavia dan tidak ada orang yang datang membeli. Semua perdagangan netral telah dihentikan. Blokade Britania (Inggris) makin lama makin ketat. Situasi menarik muncul di Jawa. Pemerintah Batavia memiliki barang dagangan bernilai beberapa juta, tetapi tidak punya uang. Ia mengeluarkan uang kertas tetapi langsung terdepresiasi karena pemerintah tidak dipercayai orang....⁸⁹

Pada masa pemerintahannya, Daendels tahu bahwa Batavia tidak akan pernah bisa dipakai sebagai basis perdagangan yang menguntungkan seperti masa emas VOC. Sebagai mana kopi yang hanya bertumpuk di gudang-gudang Batavia akibat blokade Inggris, maka produksi gula pun mengalami penurunan dalam perdagangan internasional. Seperti yang dipaparkan berikut;

Setelah pembubaran VOC, pada beberapa dasawarsa abad XIX, terjadi kemunduran pasar gula internasional, sementara di Hindia-Belanda terdapat kelebihan produksi. Hal ini merupakan akibat perang yang berkecamuk antara Inggris dan Prancis, yang juga menghambat perdagangan dengan negeri Belanda. Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) tidak melihat prospek masa depan perkebunan tebu; selama masa pemerintahannya produksi merosot drastis setelah penarikan kembali uang muka yang diberikan kepada pengusaha pabrik gula dan setelah sistem jual paksa yang biasanya menjadi ciri VOC dihapuskan.⁹⁰

c. Dalam bidang sosial-budaya

Dalam catatan sejarah kolonial dan imperialisme, dan dalam anggapan khalayak ramai, bangsa Barat pada umumnya (pemerintah Daendels), dipandang sebagai bangsa penjajah, yang mengakibatkan kesengsaraan dan kemelaratan kaum terjajah. Kulit coklat dipersepsikan sebagai golongan terjajah, sedangkan kulit putih dipandang sebagai pihak penindas, penjajah dan penyebab kesengsaraan yang mendalam bagi rakyat pribumi. Daendels pun dipandang

⁸⁹ Bernard H.M. Vlekke, *op. cit.*, hlm. 281.

⁹⁰ Pieter Creutzberg (dkk), *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia, _____, hlm. 227.

sebagai sosok yang diktator, bengis dan kejam yang sangat menindas, tingkat menindasnya begitu besar hingga berbagai julukan untuk menggambarkannya (Gubernur Jenderal bertangan besi, Gubernur Guntur dll), dan mendatangkan kebencian penduduk pribumi kepadanya.

Di tengah kebencian dan sikap protes terhadap kolonial, berkembang kesadaran dalam masyarakat bahwa proses kolonialisme merupakan suatu proses pemaksaan dan penindasan pada tatanan sosial-budaya. Akibat proses pemaksaan dan dominasi Barat dalam tatanan sosial-budaya masyarakat pribumi yang masih tradisional tersebut, timbul perlawanan dan penolakan dari penduduk pribumi.

2. Dampak Positif

a. Dalam bidang politik

Gubernur Jenderal Daendels merupakan tokoh penguasa di Jawa yang menjadi penganut idealisme liberal, yang selama berkuasa di tanah jajahan berusaha melaksanakan gagasan liberalnya. Seperti yang dilukiskan secara rinci sebagai berikut;

.....memperjuangkan diterapkannya kebebasan perseorangan, baik dalam hak milik tanah, bercocok tanam, berdagang, menggunakan hasil tanaman, maupun dalam pemilikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat tanah jajahan. Secara progresif Daendel hendak melakukan perubahan-perubahan liberal, seperti perombakan sistem pemerintahan secara radikal, meletakkan landasan sistem birokrasi Barat, merombak sistem pemerintahan feodal, penyederhanaan upacara-upacara di kerajaan, pengurangan kekuasaan bupati, meluaskan pengadilan pribumi, memajukan pertanian dan perdagangan, dan memberantas kecurangan dalam penguatan kontingenten, penyerahan paksa dan kerja paksa.⁹¹

⁹¹ Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op. cit.*, hlm. 42.

Pada masa pemerintahannya, salah satu langkah yang diambil Daendels adalah melaksanakan reformasi administratif berdasarkan landasan birokrat Barat yang diyakininya. Sejalan dengan reformasi tersebut, melalui Dekrit 18 Agustus 1808 yang dikeluarkannya, Daendels menetapkan provinsi pantai timur laut Jawa menjadi lima prefektorat dan 38 kabupaten. Daendels juga mengangkat bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda, diberi pangkat militer dan digaji memadai.⁹²

Bersamaan dengan ketetapan reformasi pemerintahan tersebut, sebagai langkah mewujudkan kepastian hukum dan perluasan peradilan, Daendels memisahkan lembaga peradilan bagi orang pribumi Jawa dan orang asing, ia juga membangun lembaga peradilan di setiap kabupaten dan prefektorat. Dalam pelaksanaannya, khusus bagi penduduk pribumi Jawa menurut hukum adat-istiadat dan hukum Jawa sedangkan bagi orang asing menurut hukum Hindia-Belanda.⁹³

Semua reformasi ini sangat penting untuk dilaksanakan, dengan demikian sistem lama peninggalan VOC diperbaharui dan fondasi untuk sistem baru diletakkan. Bagi Daendels (pemerintah Belanda), dengan dilaksanakannya reformasi administrasi pemerintahan ini maka kekuasaan bupati menjadi terbatas, dan langkah mengukuhkan kekuasaan dalam waktu yang lebih lama sesuai dengan kepentingan kolonial (pemerintah Belanda) tercapai.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia (Jawa), Gubernur Jenderal Daendels tidak hanya berhasil meletakkan dasar-dasar birokrasi modern di Indonesia (Jawa), tetapi juga berhasil membangun pertahanan

⁹² Bernard H.M. Vlekke, *op .cit.*, hlm. 276.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 278.

militer dan memperluas pengaruh kolonial. Jadi, reformasi birokrasi pemerintahan di Jawa, adalah cara menopang konsolidasi kekuasaan untuk keberhasilan proses intensifikasi eksploitasi sumber daya terhadap tanah jajahan.

b. Dalam bidang ekonomi

Untuk menjalankan pemerintahan di Jawa, yang terpisah dari negeri induk ditambah dengan blokade dan ancaman serangan dari Inggris bukan merupakan pekerjaan mudah bagi Gubernur Jenderal Daendels. Sangat jelas dalam tugas-tugasnya mempertahankan Jawa, memerlukan perbendaharaan yang sangat besar. Seperti membangun pertahanan militer, menambah jumlah serdadu, membangun benteng, mendirikan pabrik senjata, dan membangun jalan Raya Pos, yang semuanya tidak mungkin didapat dari negeri induk pada waktu itu bukanlah pekerjaan mudah.

Dalam keadaan yang mendesak, Gubernur Jenderal Daendels melakukan berbagai upaya untuk menyediakan keuangan dan sarana guna menyokong proyek-proyeknya di Jawa. Di bawah pemerintahannya, penanaman wajib kopi diperluas oleh Daendels, semua penyerahan masih tetap bersifat wajib, dan semua pekerjaan tetap diwajibkan (dituntutnya rodi yang berat).⁹⁴ Dengan demikian, maka misi utama pemerintahannya yang membutuhkan pendanaan dan sarana bisa terpenuhi.

Daendels memang sangat membutuhkan mobilisasi sumber daya (alam dan tenaga kerja) yang sangat besar. Daendels melakukan upaya penjualan tanah, satu langkah yang bermanfaat untuk mencapai tujuan atau misinya itu. Daendels

⁹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *op. cit.*, hlm. 139-140.

menjual tanah yang luas di barat dan timur Batavia, dan transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina, Han Ti Ko, seharga 1 juta dolar.⁹⁵ Selain itu, Daendels juga menjual rumah peristirahatan Buitenzorg, dari transaksi ini Daendels mendapatkan keuntungan pribadi sebesar 900.000 gulden.⁹⁶

Jadi, seperti telah diuraikan di atas, maka keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda (Daendels) adalah tetap mempertahankan sifat, tujuan utama dan fungsi tanah jajahan, dimana tanah jajahan berfungsi sebagai pemasok keuntungan bagi negeri induk (Belanda), dan proses eksploitasi sumber daya makin intensif.

c. Dalam bidang sosial-budaya

Selama masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal, Daendels berupaya memperluas pengaruhnya (budaya Barat) terhadap tatanan sosial-budaya tradisional Jawa. Untuk menamamkan budaya Barat, Daendels berhasil merombak tata cara atau upacara di istana para penguasa feodal Jawa (raja-raja Jawa). Daendels mengeluarkan peraturan tentang upacara dan sopan santun, dimana ia melarang pejabat Belanda memberi hormat menurut tradisi Jawa kepada raja.⁹⁷ Daendels juga memerintahkan para residen untuk memakai atribut kerajaan, seperti payung emas dan tidak mengangkat topi waktu memberi hormat kepada raja.⁹⁸ Dengan demikian, maka Daendels sebagai gubernur berhasil menggeser

⁹⁵ Bernard H.M. Vlekke, *op.cit.*, hlm. 283.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm, 179.

⁹⁷ D.G.E. Hall, *op.cit.*, hlm. 449.

⁹⁸ Bernard M.H. Vlekke, *op.cit.*, hlm. 279.

tatanan sosial-budaya Jawa dengan budaya Barat. Mengenai citra budaya Eropa yang terserap dalam tatanan sosial-budaya pribumi disebutkan sebagai berikut:

....Ketika para raja-raja Jawa, mengenakan jakaet orang Belanda dan memakai topi beludru; banyak abdi dalem kraton kemudian jada mengikutinya. Hal ini meningkatkan 'citra budaya' bangsa kulit putih di kalangan masyarakat Jawa. Demikian pula ketika para raja Jawa mulai memakai berbagai perlengkapan busana dan senjata yang berasal dari Eropa, lambat laun kebudayaan tersebut menjadi akrab dengan masyarakat Jawa. Diserapnya kebudayaan Eropa di kalangan raja-raja Jawa dan petinggi kerajaan lainnya secara bertahap terjadi melalui wujud gaya hidup para pejabat kolonial di wilayah Nusantara, yaitu budaya gaya 'Napoleonik' yang dipakai oleh Daendels...⁹⁹

Daendels berhasil melakukan proses pembaratan dengan terlaksananya pembatasan upacara kerajaan, yang dianggap Daendels sebagai pemborosan. Langkah tersebut berhasil memangkas beberapa tata upacara yang sebelumnya dilakukan oleh raja Jawa. Dengan membuang pengaturan tradisional itu, Daendels berhasil mengangkat kedaulatan negara Belanda, untuk menegaskan kepada rakyat pribumi Jawa bahwa kekuasaan tertinggi di tanah jajahan ada pada Batavia.

⁹⁹ Agus Sachari, *op.cit.*, hlm. 49.

BAB V

KESIMPULAN

Pada akhir abad ke-18, negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis (1795-1813). Pasca runtuhnya VOC, Pemerintah Belanda yang berada di bawah aneksasi Prancis langsung mengambil alih kekuasaan atas wilayah koloni di Jawa. Aneksasi Belanda oleh Prancis ini sangat berdampak pada wilayah koloni Belanda di Jawa. Mengingat perseteruan antara Prancis dan Inggris semakin dahsyat, sementara Belanda merupakan negara boneka Prancis, mau tidak mau Belanda terlibat pada pertentangan antar kedua negara adidaya itu. Perseteruan Prancis dan Inggris kian tahun semakin memanas, saling berlomba untuk menunjukkan superioritas dan prestise sebagai negara imperialis terkuat, termasuk dalam hal kepemilikan tanah jajahan. Sekarang, Jawa berada dalam posisi terancam, Inggris berniat merebut dan menguasai Jawa. Untuk mengatasi masalah itu, Raja Louis merasa bahwa Jawa perlu dipimpin oleh seorang militer yang kuat, yang mampu melakukan perubahan, serta mampu mempertahankan pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Dengan pertimbangan pengalaman dan kemampuan militer, Raja Louis kemudian mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada tanggal 28 Januari 1807. Sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, Daendels ditugaskan untuk urusan militer, reorganisasi tentara, membenahi dan mempersiapkan pertahanan militer di Jawa. Hal-hal lain yang secara khusus diperintahkan kepadanya adalah penyelidikan terhadap kemungkinan

penghapusan tanaman paksa dan penyerahan paksa kopi, dan perbaikan kondisi kehidupan penduduk asli di Jawa.

Herman Willem Daendels, merupakan seorang orator revolusioner kaum Patriot Belanda penganut liberalisme. Berdasarkan ide-ide liberal, secara progresif ia hendak melakukan perubahan-perubahan, seperti perombakan sistem pemerintahan feodal, meletakkan landasan sistem birokrasi Barat, pengurangan kekuasaan bupati, meluaskan pengadilan, memperjuangkan kebebasan perseorangan, dan penghapusan kecurangan, serta penyerahan paksa dan kerja paksa. Terlepas dari pembaharuan berdasarkan ide-ide liberal tersebut, merupakan keharusan bagi Daendels untuk tetap setia pada tugas-tugas yang diembannya. Hal demikian menjadikan praktek pemerintahan Daendels yang berdasarkan dari ide-ide liberal tersebut sangat fleksibel, bahkan sering sangat kontradiktoris dengan gagasan liberalisme. Memang dalam konstelasi politik dilakukan perubahan yang sejalan dengan gagasan liberalisme. Akan tetapi dalam prakteknya, kekuatan diktator menjadi tameng utama. Memulai pemerintahannya di Jawa, tindakan yang diambil Gubernur baru itu adalah reformasi total administrasi pemerintahan dan lembaga peradilan, serta membangun pertahanan militer. Kemudian, Daendels melakukan sentralisasi kekuasaan, ia menghapuskan Propinsi Pantai Timur Jawa dan membaginya menjadi 5 prefekturat (devisi atau provinsi) dan 38 regenschap (kabupaten). Kekuasaan bupati ditiadakan dan upacara-upacara yang dipandang sangat memboroskan dibatasi. Para penguasa feodal (raja-raja) Jawa dinyatakan sebagai pegawai pemerintah Belanda, mereka digaji dan diberi pangkat militer. Semua langkah-langkah Daendels memerlukan biaya yang besar dan tenaga yang

banyak. Padahal hubungan dengan negeri induk terputus karena blokade Inggris, hal ini berdampak pula bagi terhambatnya produksi dari Nusantara. Daendels berusaha mencari jalan keluar dalam persoalan pembiayaan yang memerlukan perbendaharaan yang besar dan persoalan tenaga kerja yang banyak guna mendukung langkah-langkahnya. Sepertinya dengan mehidupkan kebiasaan VOC bisa mengatasi permasalahan itu, cara lama VOC dipandang Daendels sebagai jalan keluar bagi permasalahan biaya dan tenaga kerja. Daendels mehidupkan kembali kebiasaan VOC, yaitu produksi secara feodal, kerja rodi dan penyerahan hasil bumi yang wajib masih dipertahankan. Selain itu Daendels juga menjual tanah kepada partikelir (*particuliere landrijen*) untuk menyokong perbendaharaan. Tak kurang dari itu, dalam melancarkan program-program besarnya, seperti pembangunan benteng-benteng, pabrik senjata, dan jalan Raya Pos. Daendels menerapkan kerja paksa kepada rakyat, proyek-proyek ini banyak menelan koban jiwa dan rakyat bekerja tanpa diupah. Begitulah yang terjadi dengan kawasan Jawa.

Proses interaksi kekuasaan antara negara-negara kerajaan tradisional di Indonesia (Jawa) dengan kekuasaan Belanda pada masa Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811), menunjukkan dua perkembangan yang sangat berbeda. Di satu pihak, tampak makin meluasnya intervensi kekuasaan kolonial Belanda. Sementara itu, di lain pihak terlihat makin merosotnya kekuasaan negara-negara kerajaan tradisional di Indonesia (Jawa). Meluasnya pengaruh pemerintah kolonial rezim Daendels di Indonesia membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan fisik, tetapi juga

psikis, bahkan keinginan rakyat untuk memperbaiki taraf hidupnya pupus. Selain meninggalkan dampak negatif (penindasan dan kemiskinan bagi rakyat), dari sana terdapat hal-hal positif yang sedikit banyaknya bermanfaat, masih bisa dirasakan dan tersisa hingga saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Anton Haryono. 2011. *Sejarah (Sosial) Ekonomi Teori Metodologi Penelitian dan Narasi Kehidupan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (USD).
- Agus Sachari. 2007. *Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna Perkembangan Gaya Visual Karya Desain di Indonesia abad ke-20*. Jakarta: Erlangga.
- Boxer, C.R. 1983. *Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799 (terjemahan)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa. (terjemahan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creutzberg, Pieter (dkk). 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dorleans, Bernard. 2006. *Orang Indonesia & Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hardi. 1988. *Menarik Pelajaran dari Sejarah*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Kardiyat Wiharyanto, A. 2006. *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (USD).
- Nugroho Notosusanto (dkk). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1984. *Sejarah Ekonomi Indonesia, dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Parakitri Tahi Simbolon. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pringgodigdo, A.G. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius
- Ricklefs, M.C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

_____. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Vress

_____. (dkk). 2013. *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Rocher, Jean & Iwan Santosa. 2013. *Sejarah Kecil Indonesia Prancis*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 Dari Emporium sampai Imporium*. Jakarta: PT Gramedia.

Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sutarjo Adikusilo, J.R. 2007. *Sejarah Pemikiran Barat: dari yang Klasik sampai yang Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma (USD).

Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

B. Sumber Internet:

<https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/1819072011/peta-jalan-roya-pos>.
Diakses tanggal 5 Juni 2014

http://lms.aau.ac.id/library/ebook/J_047_12/files/res/downloads/download0040.pdf. Diakses pada tanggal 25 Mei 2014.



LAMPIRAN

SILABUS

Nama Sekolah : SMA NEGERI 01 MARAU

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia

Kelas : XI (Dua)

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.2 Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat (Portugis, Belanda, Inggris) di Indonesia.</p>	<p>Eksplorasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa • Proses eksploitasi sumber daya pada masa gubernur jenderal 	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa membaca buku sumber, browsing internet dan berdiskusi kelompok tentang eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa. <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa bertanya dan menyampaikan pendapat tentang eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa <p>Mengumpulkan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi terkait tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa melalui bacaan, internet dan sumber-sumber lainnya 	<p>Observasi: mengamati kegiatan peserta didik dalam diskusi dan presentasi.</p> <p>Tes tertulis : menilai kemampuan peserta didik dalam memahami eksploitasi sumber daya rezim Daendels di Jawa</p>	<p>1 X 45 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I Wayan Badrika. 200. <i>Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS</i>. Jakarta: Erlangga. • Anton Haryono. 2011. <i>Sejarah (Sosial) Ekonomi Terori Metodologi Penelitian dan Narasi Kehidupan</i>. Yogyakarta: USD • Vlekke, Bernard H.M. 2008. <i>Nusantara Sejarah Indonesia</i>. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

	<p>Herman Willem Daendels di Jawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak eksploitasi pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa. 	<p>Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis informasi dan data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa. <p>Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk tulisan, selanjutnya dilaksanakan tanya jawab (kuis) tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa. 	<p>Tugas terstruktur : membuat makalah tentang proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hall, D.G.E. 1988. <i>Sejarah Asia Tenggara</i>. Surabaya: Usaha Nasional • Sartono Kartodirdjo. <i>Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imporium</i>. Jakarta: PT Gramedia
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 01 MARAU

Kelas/Semester : XI (Dua) / Gasal

Mata Pelajaran : Sejarah

Materi Pokok : Eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811

Pertemuan ke : 1

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, *responsive*, dan pro-aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 3.2 Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat (Portugis, Belanda, Inggris) di Indonesia.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.1 Menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan Bung Karno “Jas Merah”, artinya setelah belajar dari pengalaman sejarah yang pahit masa kolonial Daendels dapat menjadikannya sebuah pelajaran paling penting dan berharga.
- 2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah terkait eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 2.2 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas.
- 3.1 Mendeskripsikan situasi menjelang penugasan gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 3.2 Mendeskripsikan proses eksploitasi sumber daya pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa
- 3.3 Menganalisis Dampak eksploitasi pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 4.1 Menyajikan laporan lisan dalam bentuk presentasi mengenai gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan.
- 4.2 Mengolah informasi dalam bentuk artikel mengenai situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa.

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui diskusi, mengamati dan membaca referensi siswa dapat :

- 1.2 Menunjukkan nilai- nilai syukur kepada Tuhan atas pelajaran yang positif dari sejarah rezim pemerintahan Deandels (Belanda).
- 2.3 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah terkait eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 2.4 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas.

- 3.1 Mendeskripsikan situasi menjelang penugasan gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 3.2 Mendeskripsikan proses eksploitasi sumber daya pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa
- 3.3 Menganalisis Dampak eksploitasi pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
- 4.1 Menyajikan laporan lisan dalam bentuk presentasi mengenai gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan.
- 4.2 Mengolah informasi dalam bentuk artikel mengenai situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa.

E. Materi Ajar

1. Penugasan gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
2. Proses eksploitasi sumber daya pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.
3. Dampak eksploitasi pada masa gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Jawa.

F. Alokasi waktu :

1 x 45 menit

G. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran

- Pendekatan : *Scientific*
- Model : TGT (*Teams Games Tournamen*)
- Metode : Ceramah, diskusi, observasi, presentasi dan Tanya-jawab (kuis)

H. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. Guru mempersilakan salah satu siswa memimpin doa b. Guru memberikan salam c. Menanyakan kepada siswa kesiapan dan	5 menit

	<p>nyaman untuk belajar</p> <p>d. Mengecek kehadiran siswa</p> <p>e. Mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran</p> <p>f. Menuliskan tujuan pembelajaran</p> <p>g. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran</p>	
Inti	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> Siswa membaca buku sumber, browsing internet dan berdiskusi kelompok tentang eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa. <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Siswa bertanya dan menyampaikan pendapat tentang eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa <p>Mengeksplorasikan/ menalar</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan informasi terkait tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa melalui bacaan, internet dan sumber-sumber lainnya <p>Mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menganalisis informasi dan data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa. 	30 menit

	<p>Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis dilaporkan dalam bentuk tulisan, selanjutnya dilaksanakan tanya jawab (kuis) tentang situasi menjelang penugasan Daendels, proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya di Jawa. 	
Penutup	<p>a. Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru menyimpulkan materi Eksploitasi sumber daya pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Jawa tahun 1808-1811.</p> <p>b. Siswa membuat tugas individu dalam bentuk makalah tentang proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya (dikumpulkan 1 minggu yang akan datang)</p> <p>c. Mengucapkan salam</p>	10 menit

I. Penilaian Hasil Belajar

- a. Test : Uraian (terlampir)
- b. Non Test :
 1. Lembar pengamatan diskusi (terlampir)
 2. Lembar pengamatan presentasi (terlampir)
 3. Lembar pengamatan sikap (terlampir)
 4. Penugasan Tersruktur : membuat makalah tentang proses eksploitasi sumber daya dan dampaknya (terlampir)

Format penulisan makalah :

BAB I Pendahuluan

BAB II Isi

BAB III Penutup

 - a. Kesimpulan
 - b. Saran

Daftar Rujukan

Catatan :

Makalah diketik dengan menggunakan huruf Arial, 12, spasi 1,5, *print-out* kertas A4, maksimal 15 lembar.

J. Sumber dan Media Belajar

1. Sumber :

a. Pustaka

I Wayan Badrika. 200. *Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS*.

Jakarta: Erlangga.

Anton Haryono. 2011. *Sejarah (Sosial) Ekonomi Terori Metodologi Penelitian dan Narasi Kehidupan*. Yogyakarta: USD

Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta:

Kepustakaan Populer Gramedia.

Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional

Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imporium*. Jakarta: PT Gramedia

b. Internet

c. Gambar

2. Media

a. *White board*/papan flannel

b. Power point

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 26 Februari 2015
Guru Mapel,

Jopi E. Gurnandy Siakut M. Pd

Jopi Engel Gurnandy S. Pd

Lampiran 1: Ringkasan Materi

1. Latar belakang penugasan Daendels di Jawa

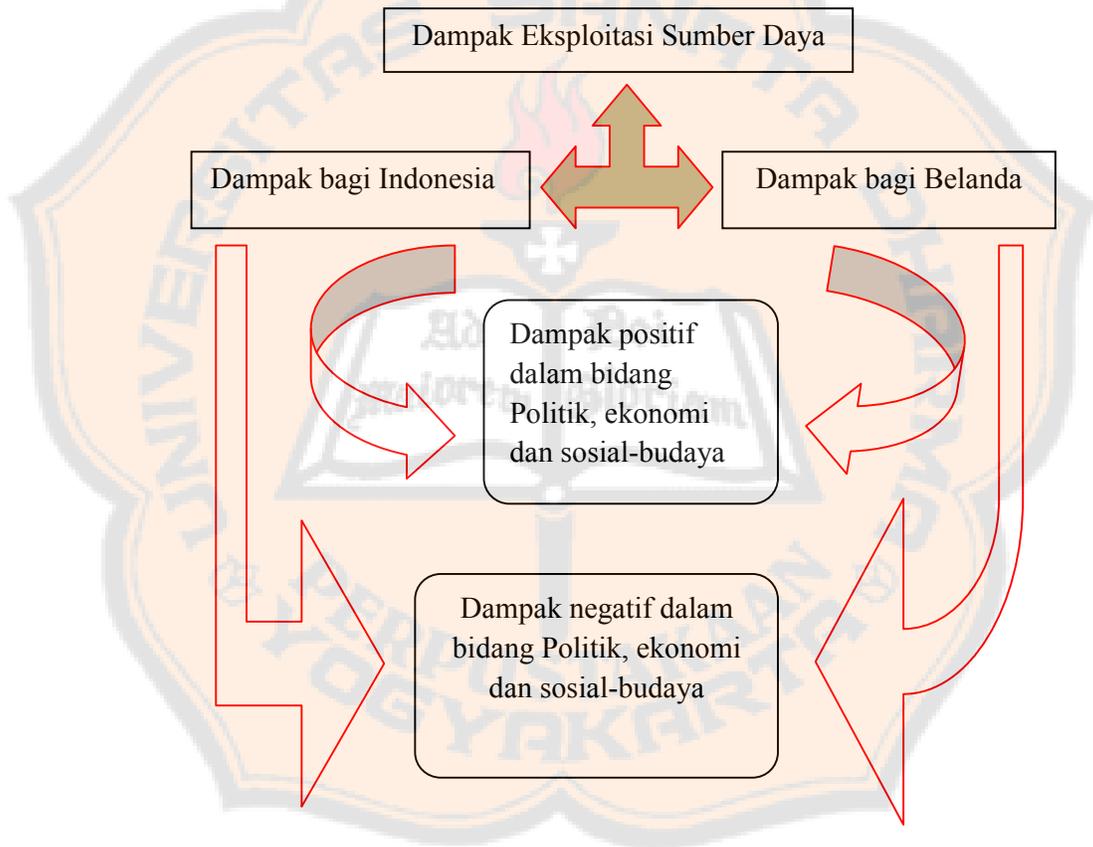
- a. Kondisi menjelang penugasan Daendels
 - Berakhirnya monopoli VOC pada akhir abad ke-18 menyebabkan peralihan kekuasaan atas wilayah Indonesia langsung di tangan pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 1 Januari 1800.
 - Pemerintah Hindia-Belanda secara resmi menggantikan pekerjaan VOC atas tanah jajahan. Menjalankan sistem pemerintahan di seberang lautan, membenahi keterpurukan VOC dan tetap melanjutkan eksploitasi sumber daya seperti pada masa VOC berkuasa. Sistem pemerintahan dan para pegawai pemerintahan Hindia-Belanda masih sama dengan masa VOC.
- b. Penugasan Daendels di Jawa
 - Daendels adalah seorang pengagum Napoleon Bonaparte yang revolusioner. Daendels terpengaruh dengan ide-ide atau gagasan dari Revolusi yang terjadi di Prancis.
 - Ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Kaisar Prancis, Daendels ditugaskan menyiapkan pertahanan dan membenahan kekuasaan di Jawa oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis.
 - Daendels tiba di Jawa dengan mengemban tugas-tugasnya, memulai pekerjaan dan program-programnya dengan perpaduan antara gagasan revolusi dan kediktatoran.

2. Proses eksploitasi sumber daya di Jawa pada masa Daendels

- Proses eksploitasi sumber daya pada masa Daendels di mulai dengan memahami gagasan-gagasan/kosep yang mempengaruhi Daendels (gagasan Revolusi Prancis).
- Proses eksplpaitasi sumber daya, dimulai dengan membenahi (reformasi) lembaga pemerintahan di Jawa, sebagai jalan untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial dan melancarkan prakter eksploitasi sumber daya di Jawa. Eksploitasi sumber daya berupa; tanah, hasil perkebunan, tenaga rakyat yang dipekerjakan tanpa di bayar, misalnya pekerja paksa membuat jalan raya, benteng, pelabuhan dan petani di perkebunan kopi.

- Pada masa pemerintahannya, Daendels banyak membuat proyek-proyek besar guna menyokong kepentingan kolonial. Daendels membangun benteng militer, pabrik senjata, pelabuhan, dan jalan raya yang semuanya dipakai untuk kepentingan militer kolonial. Tenaga rakyat dikerahkan untuk pekerjaan proyek-proyek besai itu, tanpa digaji, yang menyebabkan rakyat sengsara dan tertindas.

3. Dampak eksploitasi sumber daya di Jawa



Lampiran 2 : Soal Tes

Soal Uraian

1. Jelaskan proses peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia-Belanda!
2. Jelaskan tugas-tugas Daendels selama memerintah sebagai Gubernur Jenderal di Jawa!
3. Jelaskan inti sari dari gagasan revolusioner Daendels!
4. Pada masa pemerintahannya di Jawa, Daendels melakukan reformasi dalam lembaga peradilan. Jelaskan secara singkat!
5. Sebutkan dampak positif dalam bidang politik bagi Indonesia selama masa pemerintahan Daendels

Kunci Jawaban

1. Proses peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah Hindia-Belanda
 - ✓ Menjelang akhir abad ke-18 VOC mengalami kemunduran dan tutup buku pada 1 Januari 1800.
 - ✓ Kebangkrutan VOC ini disebabkan oleh maraknya kasus korupsi dan salah urus disegala segi pemerintahannya.
 - ✓ Pada tanggal 1 Januari 1800, secara resmi pemerintah Hindia-Belanda mengambil alih administrasi VOC atas wilayah koloni di Indonesia dan hutang-hutang VOC sebesar 134 juta gulden, menjadi tanggungan pemerintah Hindia-Belanda.
 - ✓ Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, sistem administrasi dan para pegawai masih meneruskan peninggalan yang sama persis pada masa VOC. Para pegawai kolonial dan segala macam pekerjaan serta tanggung jawab yang dipikul masih tetap sama seperti pada masa VOC.
2. Tujuan penugasan Daendels di Jawa adalah:
 - ✓ Pada awal abad ke-19, posisi Jawa sebagai wilayah kolonial Belanda terancam akibat peperangan yang terjadi antara Prancis dan Inggris. Belanda yang berada di pihak Prancis dan dikuasai Prancis merasa perlu untuk mempertahankan Jawa. Maka, Daendels yang merupakan seorang

revolusioner yang juga mempunyai pengalaman militer ditugaskan sebagai gubernur jenderal di Jawa.

- ✓ Adapun tugas-tugas yang diemban Daendels ialah sebagai berikut:
Bahwa menurut “instruksi untuk Gubernur Jendral atas Wilayah Asia milik Raja Yang Mulia” yang dikeluarkan Raja Louis pada 9 Februari 1807, 12 dari 37 pasal berhubungan dengan urusan militer dan pasal 14 menyatakan bahwa reorganisasi tentara adalah kewajibannya yang pertama. Hal-hal lain yang secara khusus diperintahkan kepadanya ialah: penyelidikan terhadap kemungkinan penghapusan tanaman paksa dan penyerahan paksa kopi, perbaikan kondisi kehidupan penduduk asli dan, terutama, budak-budak, serta yang terakhir, perbaikan kondisi saniter di Batavia, atau, jika tidak mungkin, pemindahan ibukota ke kabupaten yang lebih sehat di Jawa.
- 3. Inti sari dari gagasan revolusi Daendels adalah, bahwa ia hendak melakukan reformasi atau perubahan-perubahan menurut gagasan yang diyakininya. Daendels berusaha memperjuangkan diterapkannya kebebasan perseorangan, baik hak milik tanah, bercocok tanam, berdagang, menggunakan hasil tanaman, maupun dalam pemilikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat tanah jajahan. Secara progresif Daendels hendak melakukan perubahan-perubahan liberal, seperti perombakan sistem pemerintahan secara radikal, meletakkan landasan sistem birokrasi Barat, merombak sistem pemerintahan feodal, penyederhanaan upacara di kerajaan, penciutan kekuasaan bupati, meluaskan pengadilan, memajukan pertanian dan perdagangan, memberantas kecurangan dalam pungutan kontigente, penyerahan paksa dan kerja paksa.
- 4. Reformasi yang dilakukan Daendels dalam lembaga peradilan adalah: Daendels membentuk khusus sistem pengadilannya sendiri bagi pribumi menurut adatnya (misalnya pelaksanaan adat) tak pernah ada di bawah kompeni. Situasi yang sangat memalukan ini harus diakhiri Daendels dengan mendirikan kantor-kantor di tiap regenschap dan landdrostambt dimana pengadilan harus dilonggarkan menurut hukum adat (adatrecht). Ini terpisah dari Dewan Pengadilan yang didirikan di Batavia, Semarang dan Surabaya,

yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menyangkut orang-orang Asia, misalnya orang-orang Eropa, Cina, Arab dan yang manapun yang bukan pribumi Jawa. Dalam pengadilan ini adalah sesuai dengan Hukum Hindia Belanda. Pada Pengadilan Pribumi yang lebih rendah, pejabat-pejabat dan pendeta-pendeta diikutsertakan hadir. Pengadilan-pengadilan perfecture dipimpin oleh landdrost dengan seorang pejabat Belanda sebagai sekretaris dan sejumlah pembantu pribumi. Sistem naik banding juga dari pengadilan yang lebih rendah kepada Dewan Pengadilan telah dilembagakan. Bagi orang Jawa, terbangunnya lembaga pengadilan menurut adat setempat memberikan peluang bagi berkurangnya kesenjangan hukum atau pun kesewenang-wenangan hukum.

5. Dampak positif bagi Indonesia dalam bidang politik adalah: Dengan diprakarsainya pemerintahan yang sentralistis menurut sistem birokrasi modern, maka administrasi pemerintahan menjadi lebih rapi. Selain itu, dengan pembatasan kekuasaan dan hak bupati yang dilakukan Daendels, maka secara formal rakyat pribumi terlindungi dari kesewenang-wenangan bupati. Pada aspek pembenahan semacam ini kekuatan humaniter ide-ide liberal terlihat bisa diaktualkan.

Kriteria Penilaian

Pedoman penilaian produk :

- a. Soal 1 skornya 20
- b. Soal 2 skornya 20
- c. Soal 3 skornya 20
- d. Soal 4 skornya 20
- e. Soal 5 skornya 20

No	Skor	Nilai
1	86-100	Baik Sekali
2	71-75	Baik
3	56-70	Cukup
4	< 55	Kurang

Lampiran 3 : Lembar Pengamatan Diskusi

No	Nama Siswa	Aspek Pengamatan					
		Kerja sama	Mengemukakan ide	Keaktifan	Menghargai kelompok lain	Hasil jawaban	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala Likert 1-5, dengan kriteria

Skor 1: Pasif, tidak mengemukakan ide, tidak kooperatif hasil jawaban kurang baik

Skor 2 : Pasif, tidak mengemukakan ide, tidak kooperatif hasil jawaban baik

Skor 3 : Pasif, tidak mengemukakan ide, kooperatif hasil jawaban baik

Skor 4 : Aktif, mengemukakan ide, kooperatif hasil jawaban baik

Skor 5 : Sangat aktif , mengemukakan ide, sangat kooperatif dan hasil jawaban baik

Skor maksimal =25

$$N = \frac{\sum \text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Lampiran 4 : Lembar Pengamatan Presentasi

No	Nama Siswa	Aspek Pengamatan				Jumlah Skor	Nilai	Ket
		Komunikatif	Wawasan	Antusias	Penampilan			

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1 s.d 5 dengan kriteria:

Skor 1 : Pasif, tidak cooperative dan tidak menghargai teman.

Skor 2 : Pasif, tidak cooperative dan menghargai teman.

Skor 3 : Pasif, cooperative dan menghargai teman.

Skor 4 : Aktif, cooperative dan menghargai teman.

Skor 5 : Sangat aktif, sangat cooperative dan menghargai teman.

Skor maksimal =25

$$N = \sum \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Lampiran 5 : Lembar Pengamatan Sikap

No	Nama	Menghargai	Tanggung jawab	disiplin	Pro-aktif	responsif	jmlh

Skor maksimal = 25

kriteria penilaian untuk masing-masing aspek

5	Sangat baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

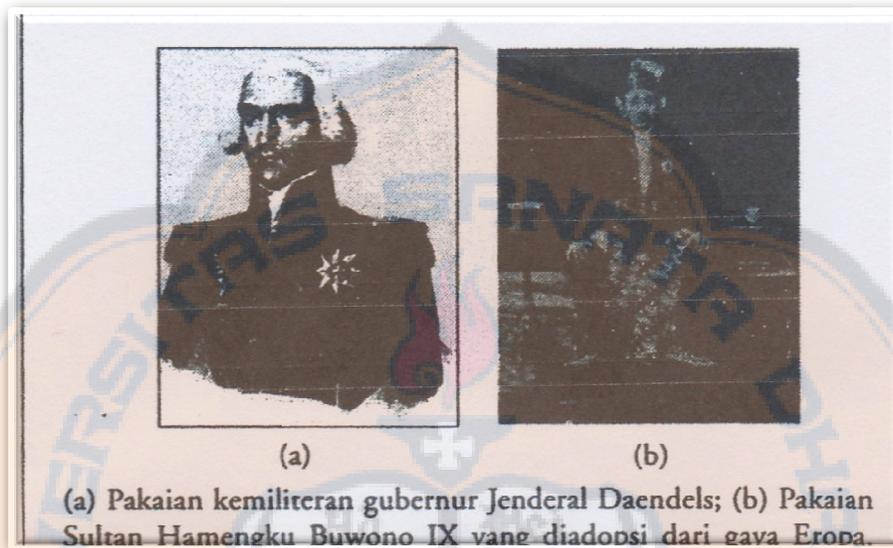
$$N = \frac{\sum \text{skor perolehan}}{\sum \text{skor maksimal}} \times 100$$

Lampiran 6 : Penilaian Makalah

Struktur Makalah	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Pendahuluan (25%)	Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan sesuai dan jelas (21-25)	Latar belakangnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan sesuai namun kurang jelas (16-20)	Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan tidak sesuai (11-15)	Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan tidak ada (6-10)	Latar belakang, rumusan masalah tidak sesuai, dan tujuan penulisan tidak sesuai dan tidak jelas (0-5)
Isi (50%)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan jelas sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai EYD, daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan (41-50)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan jelas sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (31-40)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan tidak sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (21-30)	Ketepatan dalam pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD,	Kurang tepat dalam pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan tidak sesuai metode yang dipakai

				daftar pustaka yang tidak dapat dipertangg ungjawabk an (11-10)	bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertangg ungjawabk an (0-10)
Penutup (25%)	Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan berisi pesan untuk peningkatan kepedulian terhadap hasil peninggalan sejarah (21-25)	Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan tidak berisi pesan untuk peningkatan kepedulian terhadap hasil peninggalan sejarah (16-20)	Kesimpula n tidak sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan tidak berisi pesan untuk peningkata n kepedulian terhadap hasil peninggala n sejarah (11-15)	Kesimpula n tidak sesuai dengan rumusan masalah dan ada saran namun tidak nyambung (6-10)	Kesimpula n tidak sesuai dengan rumusan masalah dan tidak ada saran yang ditulis (0-5)

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar: Pakaian militer Daendels & pakaian Sultan Hamengku Buwono IX yang diadopsi dari gaya Eropa. (Sumber: Agus Sachari. 2007. *Budaya Visual Indonesia*. Hlm 50)



Gambar: Perkebuna Kopi
(Sumber: <http://3.bp.blogspot.com/-1DgsIO-GhoM/TljHix5sJ0I/AAAAAAAAAQq/qOYvUa8Vreg/s1600/Perkebunan+3.jpg>)